

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR  
39 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN  
TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS.

POLA KLASIFIKASI KEARSIPAN

I. UMUM

Tujuan Kearsipan antara lain ialah menyediakan data dan informasi secepat-cepatnya dan setepat-tepatnya kepada yang memerlukan. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan sistem pengendalian yang terkandung di dalam arsip.

Pengendalian yang dimaksud adalah mengelompokkan arsip sesuai permasalahannya agar memudahkan penemuan kembali arsip.

II. BENTUK DAN SUSUNAN

1. Klasifikasi Kearsipan merupakan klasifikasi yang disusun berdasarkan masalah, mencerminkan fungsi dan kegiatan pelaksanaan tugas satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, yaitu menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pemerintahan umum dan otonomi daerah, ideologi, politik, pembangunan desa dan agraria diberi kode angka arab, diperinci secara desimal, dengan menggunakan tiga angka dasar, dilengkapi dengan kode pembantu, kode wilayah, dan singkatan nama komponen.
2. Pola Klasifikasi disusun secara berjenjang dengan mempergunakan prinsip perkembangan dari umum kepada khusus dalam hubungan masalah dengan tiga perincian dasar, perincian pertama, perincian kedua, dan perincian ketiga.
3. Arsip dikelompokkan dalam 10 pokok masalah diberi kode 000 sampai dengan 900.
4. Angka 100-600 merupakan kode tugas-tugas substantif, sedangkan angka 000, 700, 800, dan 900 merupakan kode tugas fasilitatif. Kode 000 menampung masalah fasilitatif di luar masalah pengawasan, kepegawaian, dan keuangan.

Disamping itu juga ditampung masalah-masalah yang berkaitan dengan kerumahtanggaan, seperti protokol, urusan dalam dan masalah-masalah yang tidak dapat dimasukkan dalam kelompok lainnya seperti perjalanan dinas, peralatan, lambang negara atau daerah, tanda-tanda kehormatan. Dengan demikian maka sepuluh pokok masalah tersebut dapat menampung seluruh kegiatan pelaksanaan tugas pemerintah Kabupaten Kudus. Sepuluh kelompok masalah tersebut adalah sebagai berikut :

000	UMUM
100	PEMERINTAHAN
200	POLITIK
300	KEAMANAN DAN KETERTIBAN

400	KESEJAHTERAAN RAKYAT
500	PEREKONOMIAN
600	PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAKERJAAN
700	PENGAWASAN
800	KEPEGAWAIAN
900	KEUANGAN

5. Kode adalah alat untuk mengenali masalah yang terkandung dalam arsip. Kode juga menunjukkan adanya urutan sistematis dalam masalah arsip dan kartu kendali dalam file.
6. Kode Pembantu merupakan bentuk penyajian dari masalah tertentu yang merupakan aspek yang selalu timbul dan berkaitan dengan masalah lainnya, ditambahkan dibelakang tiap kode yang merupakan perincian lebih lanjut, untuk dapat memberikan dimensi ekstra pada arsip. Kode Pembantu yang dimaksud adalah :

01	Perencanaan
02	Penelitian
03	Pendidikan
04	Laporan
05	Panitia
06	Seminar Lokakarya Workshop
07	Statistik
08	Peraturan Perundang-Undangan

7. Kode Wilayah adalah kode untuk menunjukkan pembagian wilayah. Dengan memperhatikan prinsip desimal.

### III. CARA PENGGUNAAN

1. Untuk memahami pola klasifikasi terlebih dahulu harus memahami perincian pokok masalah, sub pokok masalah, dan sub-sub pokok masalah. Selanjutnya perlu memahami hubungan masalah dengan sub masalahnya pada pola dengan memperhatikan efek dari prinsip berjenjang. Tiap kode, kecuali kode pokok masalah, merupakan bagian dan subordinat dari kode atasannya. Untuk mendapatkan gambaran yang benar tentang masalah 412 harus diketahui bahwa masalah ini merupakan bagian dari 410. Selanjutnya diketahui 410 merupakan bagian dari 400.

Contoh :

400	Kesejahteraan Rakyat (pokok masalah)
410	Pembangunan Desa (sub pokok masalah)
411	-
412	Perekonomian Desa

2. Untuk dapat mengklasifikasikan surat dengan kode yang benar maka, haruslah dipahami masalah yang dikandungnya. Pada umumnya prinsip

- surat dicantumkan di bagian kiri atas surat, memang ada hubungan dengan masalah surat, tetapi kerap kali perihal tersebut merupakan petunjuk yang kurang tepat. Oleh karena itu untuk menentukan kode yang tepat, harus membaca dan memahami masalah yang dikandung dalam surat. Harus selalu diingat bahwa penemuan kembali surat tergantung pada ketepatan dalam pemberian kode klasifikasi.
- 3.
  4. Surat yang mengandung lebih dari satu masalah atau masalah-masalah tersebut saling berkaitan maka harus berhati-hati dalam menentukan kode, dalam menentukan kode klasifikasi haruslah dipilih yang paling berat tekanannya dan harus diyakini kode tersebut memudahkan dalam penemuan kembali.
  5. Pemberian Kode Masalah dapat ditetapkan secara umum atau lebih terperinci.
  6. Kode Pembantu merupakan kode pelengkap yang tidak dapat dipakai tersendiri tetapi ditambahkan dibelakang kode yang memerlukan perincian lebih lanjut. Dengan ditambahkan kode pembantu, maka kode dapat memberikan dimensi ekstra pada arsip.
  7. Tunjuk silang

Jika dijumpai surat yang mengandung dua masalah dan masalah tersebut mempunyai tekanan yang sama beratnya, maka dapat diatasi dengan membuat kartu tunjuk silang. Surat tersebut diklasifikasikan dengan dua kode. Satu kode diisikan pada kartu kendali dan satu kode lagi diisikan pada kartu tunjuk silang. Dengan demikian maka penemuan kembali surat tersebut dapat dilakukan dari dua arah, misalnya surat tentang “ Persawahan untuk transmigrasi “ dapat diberi kode 521 (Tanaman Pangan) dengan tunjuk silang 475 (Transmigrasi) atau sebaliknya. Perlu diperhatikan, bahwa penggunaan tunjuk silang terbatas pada masalah-masalah yang memang sangat penting.



BUPATI KUDUS,

ttd.

M U S T H O F A

## PERINCIAN POKOK MASALAH

<b>000</b>	<b>UMUM</b>
<b>100</b>	<b>PEMERINTAHAN</b>
<b>200</b>	<b>POLITIK</b>
<b>300</b>	<b>KEAMANAN DAN KETERTIBAN</b>
<b>400</b>	<b>KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>
<b>500</b>	<b>PEREKONOMIAN</b>
<b>600</b>	<b>PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAKERJAAN</b>
<b>700</b>	<b>PENGAWASAN</b>
<b>800</b>	<b>KEPEGAWAIAN</b>
<b>900</b>	<b>KEUANGAN</b>

## PERINCIAN SUB POKOK MASALAH

<b>000 UMUM</b>	<b>300 KEAMANAN DAN KETERTIBAN</b>
010 Urusan Dalam	310 Pertahanan
020 Peralatan (Barang dan Jasa)	320 Kemiliteran/TNI/POLRI
030 Kekayaan Daerah	330 Keamanan
040 Perpustakaan/Dok./Kearsipan/Sandi	340 Pertahanan Sipil/LINMAS
050 Perencanaan dan Evaluasi	350 Kejahatan
060 Organisasi/Ketatalaksanaan	360 Bencana
070 Penelitian dan Pengembangan	370 Kecelakaan
080 Konperensi/Rapat Koordinasi	380 Pendampingan Rehabilitas dan Rekonstruksi
090 Perjalanan Dinas	390 Kerjasama BPBD dengan Instansi Lain
<b>100 PEMERINTAHAN</b>	<b>400 KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>
110 Pemerintahan Pusat	410 Pembangunan Desa
120 Pemerintahan Provinsi	420 Pendidikan
130 Pemerintahan Kabupaten/Kota	430 Kebudayaan
140 Pemerintahan Desa/Kelurahan	440 Kesehatan
150 Legislatif MPR/DPR/DPD	450 Agama
160 DPRD Provinsi	460 Sosial

170 DPRD Kabupaten/Kota  
180 Hukum  
190 Hubungan Luar Negeri

## **200 POLITIK**

210 Kepartaian  
220 Organisasi Kemasyarakatan  
230 Organisasi Profesi dan Fungsional  
240 Organisasi Pemuda  
250 Organisasi Buruh, Tani dan Nelayan  
260 Organisasi Wanita  
270 Pemilihan Umum  
280 Panwaslu  
290 -

## **600 PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAKERJAAN**

610 Pengairan  
620 Jalan  
630 Jembatan  
640 Bangunan  
650 Tata Ruang Kota  
660 Tata Lingkungan  
670 Ketenagaan/Kelistrikan  
680 Peralatan Pekerjaan Umum  
690 Air Minum

## **700 PENGAWASAN**

710 Bidang Pemerintahan  
720 Bidang Politik  
730 Bidang Keamanan/Ketertiban  
740 Bidang Kesra  
750 Bidang Perekonomian  
760 Bidang Pekerjaan Umum  
770 Pengawasan Pejabat Publik  
780 Bidang Kepegawaian  
790 Bidang Keuangan

## **PERINCIAN SUB-SUB POKOK MASALAH**

### **000 UMUM**

001 Lambang  
001.1 Garuda  
001.2 Bendera Kebangsaan  
001.3 Daerah (Provinsi / Kabupaten / Kota)  
002 Tanda kehormatan / Penghargaan (khusus untuk Non PNS)  
002.1 Bintang  
002.2 Satyalencana  
002.3 Satyakarya Nugraha  
002.4 Monumen  
002.5 Penghargaan Secara Adat

470 Kependudukan dan Catatan Sipil  
480 Media Massa  
490 -

## **500 PEREKONOMIAN**

510 Perdagangan  
520 Pertanian dan Tanaman Pangan  
530 Perindustrian  
540 Energi dan Sumber Daya Mineral  
550 Perhubungan  
560 Tenaga Kerja  
570 Penanaman Modal  
580 Perbankan Moneter  
590 Agraria

## **800 KEPEGAWAIAN**

810 Pengadaan  
820 Pengangkatan dan Mutasi  
830 Kedudukan  
840 Kesejahteraan Pegawai  
850 Cuti  
860 Penilaian  
870 Tata Usaha Kepegawaian  
880 Pemberhentian  
890 Pendidikan Pegawai

## **900 KEUANGAN**

910 Anggaran  
920 Akuntansi  
930 Perbendaharaan  
940 Pembinaan Kebendaharaan  
950 Pengelolaan Kas Daerah  
960 Evaluasi dan Pengendalian  
970 Pendapatan  
980 Pengeluaran  
990 Bendaharawan

- 002.6 Penghargaan lainnya (Kalpataru, Upakarti, Adipura, dsb)
- 003 Hari Raya / Besar
- 003.1 Nasional (17 Agustus, Hari Pahlawan, dsb)
- 003.2 Keagamaan
- 003.3 Hari Ulang Tahun / HUT (Hari jadi Kab / Kota)
- 004 Ucapan
- 004.1 Terima kasih
- 004.2 Selamat
- 004.3 Mohon diri
- 004.4 Bela sungkawa
- 004.5 Ucapan lainnya
- 005 Undangan
- 006 Tanda Jabatan
- 006.1 Pamong Praja
- 006.2 Pejabat Lainnya
- 007 Tanda gambar Presiden, Wakil Presiden dan Pejabat Pemerintah
- 008 -
- 009 -

**010 URUSAN DALAM**

- 011 Gedung Kantor, termasuk Instalasi
- 011.1 Instalasi Listrik
- 011.2 Telepon
- 011.3 Otomasi
- 011.4 Air Minum
- 011.5 Hidrant
- 011.6 Alarm
- 011.7 Internet
- 012 Rumah Dinas
- 012.1 Tanah untuk Rumah Dinas
- 012.2 Perabotan
- 013 Akomodasi / Persinggahan
- 013.1 Mess
- 013.2 Wisma
- 013.3 Hotel
- 013.4 Persinggahan Lainnya
- 014 Rumah Susun / Apartemen
- 015 Peminjaman sarana prasarana kantor (Ruangan, Gedung, Kendaraan, LCD, Laptop, dll)
- 016 Pengurusan Kendaraan Dinas
- 017 Keamanan / Ketertiban Kantor
- 018 Kebersihan Kantor
- 019 Protokol
- 019.1 Upacara Bendera / Apel Bendera / Upacara Lainnya
- 019.2 Tata Tempat (pemasangan gambar Presiden, Wapres dan Pejabat Pemerintah)
- 019.3 Audiensi
- 019.4 Penerimaan Tamu
- 019.5 Kerjasama
- 019.6 Alamat Kantor dan Pejabat
- 019.7 Spanduk, Baliho, Banner, Umbul-umbul, dll

**020 PERALATAN (BARANG DAN JASA)**

- 020.1 Penawaran

- 020.2           Standarisasi harga
- 021           Alat Tulis
- 022           Barang
- 022.1           Barang bergerak
- 022.2           Barang tidak bergerak
- 023           Jasa
- 024           -
- 025           -
- 026           -
- 027           Pengadaan termasuk pengumuman pengadaan, penunjukan, lelang
- 027.1           Prakualifikasi : Rapat persiapan, HPS, Penjelasan pekerjaan /  
                  anwijzing, negoisasi, evaluasi
- 027.2           SPK, Kontrak / Amandemen / Addendum, Teguran
- 027.3           Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
- 027.4           Serah Terima Pekerjaan
- 027.5           Pemeriksaan Pekerjaan
- 027.6           Perpanjangan waktu / Force Majore
- 027.7           Denda
- 027.8           Sanggahan
- 027.9           Pemeliharaan Barang / Jasa
- 028           Inventaris
- 028.1           Pendataan Barang Milik Negara
- 028.2           Pemeliharaan Barang Milik Negara
- 028.3           Penghapusan Barang Milik Negara
- 029           -

**030           KEKAYAAN DAERAH**

- 031           Barang – barang tidak bergerak (tanah, perkebunan / pertanian /  
                  hutan / tambak)
- 032           Barang-barang tidak bergerak (gedung, asrama, monumen /  
                  bangunan bersejarah, dll)
- 033           Tanaman
- 034           Alat-alat Berat
- 035           Hewan
- 036           Barang Persediaan dalam Gudang
- 037           Alat pengangkut (Darat, Laut, Udara)
- 038           Peralatan Pabrik / Kantor, Laboratorium
- 039           Peralatan Kesehatan / Medis (Rumah Sakit, Balai Pengobatan)

**040           PERPUSTAKAAN / DOKUMEN / KEARSIPAN / SANDI**

- 041           Perpustakaan
- 041.1           Pameran Bahan Perpustakaan
- 041.2           Pengolahan (Katalog, Bibliografi, dll)
- 041.3           Sirkulasi / Layanan
- 041.3.1           Keanggotaan
- 041.3.2           Peminjaman dan Pengembalian
- 041.4           Deposit
- 041.5           Pemeliharaan, Pelestarian / Alih Media
- 041.6           Pembinaan Perpustakaan
- 041.6.1           Bantuan Buku, Rak
- 041.7           Penghapusan / Penyusutan Bahan Perpustakaan

- 041.8 Jenis-Jenis Perpustakaan (Umum, Khusus, PT, Sekolah, Keliling, Masyarakat)
- 041.9 Kemitraan, Forum Perpustakaan, Kerjasama antar Perpustakaan
- 042 Dokumentasi
- 043 -
- 044 -
- 045 Kearsipan
  - 045.1 Pola Klasifikasi
  - 045.2 Akuisisi Arsip
  - 045.3 Penyusutan Arsip
    - 045.3.1 Jadwal Retensi Arsip
    - 045.3.2 Penilaian Arsip
    - 045.3.3 Pemindahan Arsip
    - 045.3.4 Penyerahan Arsip
    - 045.3.5 Pemusnahan Arsip
  - 045.4 Pembinaan Kearsipan
    - 045.4.1 Pengawasan
    - 045.4.2 Bimbingan Kearsipan
  - 045.5 Pemeliharaan, Pelestarian / Konservasi Arsip
    - 045.5.1 Fumigasi
    - 045.5.2 Laminasi
    - 045.5.3 Alih Media
  - 045.6 Layanan
  - 045.7 Pemasarakatan
    - 045.7.1 Pameran
    - 045.7.2 Penerbitan Naskah Sumber Arsip
    - 045.7.3 Sosialisasi Kearsipan
  - 045.8 Pengembangan Sistem
    - 045.8.1 Sistem Kearsipan
    - 045.8.2 Sistem Jaringan Informasi Kearsipan
- 046 Sandi
- 047 Telegram, Telex, Radio, ISB
- 048 Data Elektronik
- 049 -

## **050 PERENCANAAN DAN EVALUASI**

Meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Klasifikasikan disini proyek-proyek pembangunan, RKP, RKPD, RKA, DPA, Laporan Fisik Keuangan Kegiatan Pembangunan Musrenbang Pusat, Musrenbang Kecamatan, dan Musrenbang Desa

- 050.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
  - 050.1.1 RENSTRA (Rencana Strategis)
  - 050.1.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
  - 050.1.3 RENSTRA BAPPEDA
- 050.2 Program Nasional
  - 050.2.1 RKP (Rencana Kerja Pembangunan)
  - 050.2.2 RKA-KL (Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga)
  - 050.2.3 RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah)
  - 050.2.4 Rencana Kerja OPD
  - 050.2.5 KUA (Kebijakan Umum Anggaran), KUPA (Kebijakan Umum Perubahan Anggaran) dan PPAS (Penetapan Plafon Anggaran Sementara)



- 050.2.6 Jawaban Gubernur atas Pandangan Fraksi
- 050.2.7 Nota Keuangan
- 050.2.8 RKP (Rencana Kerja Tahunan)
- 050.2.9 RKO (Rencana Kerja Operasional)
- 051 Laporan
  - 051.1 Laporan Berkala
  - 051.2 LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
- 052 Evaluasi
  - 052.1 Evaluasi Rencana Strategis
    - 052.1.1 Evaluasi Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah
    - 052.1.2 Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah
    - 052.1.3 Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten / Kota
    - 052.1.4 Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
  - 053 -
  - 054 -
  - 055 -
  - 056 -
  - 057 -
  - 058 -
  - 059 -

## **060 ORGANISASI / KETATALAKSANAAN**

- 061 Organisasi
  - 061.1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja
  - 061.2 Tata tertib kantor, termasuk pengaturan hari dan jam kerja pegawai
- 062 Organisasi Badan Non Pemerintah
- 063 Organisasi Badan Internasional
- 064 Organisasi Semi Pemerintah BKS - AKSI
- 065 Ketatalaksanaan
  - 065.1 Tata Naskah Dinas
  - 065.2 Stempel
    - 065.2.1 Stempel Jabatan
    - 065.2.2 Stempel Dinas
  - 065.3 Papan Nama Instansi Pemerintah / Non Pemerintah
  - 065.4 Alamat-alamat Kantor dan Pejabat
  - 065.5 Ketentuan Pakaian Dinas dan Atribut
- 066 Tata Hubungan Kerja
- 067 Standar Operasional Prosedur
  - 067.1 Standar Operasional Prosedur Pelayanan
  - 067.2 Standar Operasional Prosedur Kerja
- 068 Evaluasi dan Pelaporan Ketatalaksanaan
- 069 Analisis Jabatan
  - 069.1 Pengukuran / Penilaian Beban Kerja Jabatan Struktural dan Fungsional
  - 069.2 Uraian Jabatan

## **070 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

- 071 Riset meliputi perijinan bagi peneliti, riset design, pembahasan sampai dengan laporan akhir riset
- 072 Pengembangan
  - 072.1 KRENOVA (Kreatifitas dan Inovasi Masyarakat)

072.2	SINAS (Sistem Inovasi Nasional)
072.3	SIDA (Sistem Inovasi Daerah) meliputi Cluster, Kabupaten / Kota, Desa Inovatif
072.4	Inkubator Teknologi dan Bisnis
072.5	Pameran Produk Inovasi / Ristek
072.6	BTC (Bisnis Teknologi Center)
072.7	RAPTEK (Penerapan IPTEK)
072.8	HKI (Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual)
073	Kajian
073.1	Kajian Strategis / Diskusi / Forum Grup Discussion (FGD)
073.2	Seminar
073.3	Workshop
073.4	Rapat Koordinasi / Rapat Teknis
073.5	Lokakarya
073.6	Desiminasi / Sosialisasi Hasil Penelitian
074	Kerjasama Penelitian
074.1	Instansi Pemerintah Pusat / Daerah
074.2	Perguruan Tinggi Negeri / Swasta
074.3	Lembaga Swasta Nasional, Lembaga Swadaya Masyarakat
074.4	Lembaga Internasional
075	Perekayasaan
076	JARLITBANG (Jaringan Penelitian dan Pengembangan)
077	Publikasi Ilmiah
077.1	Jurnal Ilmiah
078	-
079	-
<b>080</b>	<b>KONPERENSI / RAPAT KOORDINASI</b>
081	Gubernur
082	Bupati / Walikota
083	Komponen Eselon lainnya (termasuk pimpinan OPD)
084	Instansi lainnya (di luar Kemendagri)
085	Internasional di Dalam Negeri
086	Internasional di Luar Negeri
087	-
088	-
089	-
<b>090</b>	<b>PERJALANAN DINAS</b>
091	Perjalanan Presiden dan Wakil Presiden ke Daerah
092	Perjalanan Menteri ke Daerah
093	Perjalanan Pejabat Tinggi (Pejabat Eselon 1)
094	Perjalanan PNS meliputi Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Tugas
095	Perjalanan Tamu Asing ke Daerah
096	Perjalanan Presiden dan Wakil Presiden ke Luar Negeri
097	Perjalanan Menteri ke Luar Negeri
098	Perjalanan Pejabat Tinggi ke Luar Negeri
099	Perjalanan Pegawai ke Luar Negeri
<b>100</b>	<b>PEMERINTAHAN</b>
101	-
102	-
103	-
104	-

105 -  
106 -  
107 -  
108 -  
109 -

**110 PEMERINTAHAN PUSAT**

111 Presiden  
Meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan, sumpah dan serah terima jabatan  
111.1 Pertanggung jawaban Presiden kepada MPR  
111.2 Amanat Presiden / Amanat Kenegaraan  
112 Wakil Presiden  
Meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan, sumpah dan serah terima jabatan  
113 Susunan Kabinet  
113.1 Reshuffle  
113.2 Penunjukan Menteri ad Intern  
113.3 Sidang Kabinet, Sidang Stabilitas Ekonomi, lihat 500.1  
114 Kementerian Dalam Negeri  
114.1 Amanat Menteri Dalam Negeri  
115 Kementerian Lainnya  
116 Lembaga Tinggi Negara (DPA, MA, BPK)  
117 Lembaga Non Kementerian  
118 Otonomi Daerah  
119 Kerjasama antar Kementerian

**120 PEMERINTAH PROVINSI**

120.0.1 Kebijakan Pemerintah Provinsi  
120.0.2 Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Gubernur (LKPJ)  
120.0.3 Monografi, tambahkan Kode Wilayah  
120.1 Koordinasi  
120.1.1 Organisasi Perangkat Daerah (OPD)  
120.1.2 Instansi Vertikal  
120.1.3 Kerjasama antar Provinsi / Daerah dan Luar Negeri  
121 Gubernur  
Meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan, pemberhentian, serah terima jabatan dan sebagainya  
122 Wakil Gubernur  
Meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan, pemberhentian, serah terima jabatan dan sebagainya  
123 Sekretaris Daerah  
Meliputi pencalonan, serah terima jabatan  
124 Badan-Badan Pertimbangan Daerah, meliputi Muspida  
125 Pembentukan / Pemekaran  
125.1 Pembentukan Daerah Otonom  
125.2 Pembentukan Wilayah  
125.3 Perubahan Batas Wilayah  
125.4 Pemekaran Wilayah  
125.5 Permasalahan Batas Wilayah  
125.6 Pemindahan Ibukota Provinsi  
125.7 Pemberian dan Penggantian nama Kota, Daerah, Jalan  
126 Pembagian Wilayah  
127 Penyerahan Urusan

128 -  
129 -

**130 PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA**

- 130.0.1 Kebijakan Pemerintah Kabupaten / Kota
- 130.0.2 Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Bupati / Walikota (LKPJ)
- 130.0.3 Monografi
- 130.1 Koordinasi
  - 130.1.1 OPD (Organisasi Perangkat Daerah)
  - 130.1.2 Instansi Vertikal
  - 130.1.3 Kerjasama antar Provinsi / Daerah dan Luar Negeri
- 131 Bupati  
Meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan, pemberhentian, serah terima jabatan dan sebagainya
- 132 Wakil Bupati  
Meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan, pemberhentian, serah terima jabatan dan sebagainya
- 133 Sekretaris Daerah  
Meliputi pencalonan, serah terima jabatan
- 134 Forum Koordinasi Pemerintah di Daerah, meliputi Muspida
- 135 Pembentukan Daerah
  - 135.1 Pembentukan Daerah Otonom
  - 135.2 Pembentukan Wilayah
  - 135.3 Perubahan Batas Wilayah
  - 135.4 Pemekaran Wilayah
  - 135.5 Permasalahan / Perselisihan Daerah
  - 135.6 Pemindahan Ibukota Kabupaten / Kotamadya
  - 135.7 Pemberian dan penggantian nama kota, daerah, jalan
- 136 Pembagian Wilayah
- 137 Penyerahan Urusan
- 138 Pemerintahan Wilayah Kecamatan
  - 138.1 Pembentukan kecamatan
  - 138.2 Pemekaran kecamatan
  - 138.3 Perluasan / perubahan batas wilayah kecamatan
  - 138.4 Pemindahan Ibukota Kecamatan
  - 138.5 Laporan Kecamatan
- 139 -

**140 PEMERINTAHAN DESA / KELURAHAN**

- 141 Pemerintahan Desa, Kelurahan
  - 141.1 Kepala Desa / Petinggi, Lurah, meliputi pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pelantikan, serah terima, dsb.
    - 141.1.1 Biaya pemilihan Kepala Desa / Petinggi.
  - 141.2 Badan Permusyawaratan Desa (BPD), meliputi pembentukan, keanggotaan, kepengurusan dan kegiatan BPD
  - 141.3 Perangkat Desa / Kelurahan
    - 141.3.1 Sekretaris kelurahan, Sekretaris desa / carik, meliputi pencalonan, penyeleksian, pengangkatan, pemberhentian, pemberhentian sementara
    - 141.3.2 Perangkat Desa Lainnya, meliputi pencalonan, penyeleksian, pengangkatan, pemberhentian, pemberhentian sementara
- 142 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kelurahan (APBDes/kel)

- 142.1 Rutin / ADD
- 142.2 Pembangunan
- 142.3 Anggaran Belanja Tambahan
- 142.4 Pendapatan desa / kelurahan
  - 142.4.1 Urusan Desa / Kelurahan
  - 142.4.2 Penerimaan yang berasal dari Pemerintah Pusat
  - 142.4.3 Penerimaan yang berasal dari Pemerintah Propinsi
  - 142.4.4 Penerimaan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten / Kota
  - 142.4.5 Penerimaan yang berasal dari pajak dan retribusi daerah yang diserahkan kepada desa / kelurahan
  - 142.4.6 Pendapatan Asli Desa
  - 142.4.7 Penerimaan Lain-lain yang sah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku
  - 142.4.8 Hasil dari Gotong royong masyarakat
- 143 Kekayaan Desa
  - 143.1 Tanah hak pakai desa
    - 143.1.1 Tanah bengkok
    - 143.1.2 Tanah titisara / tegal pangonan
    - 143.1.3 Tanah desa lainnya
  - 143.2 Jalan desa
  - 143.3 Bangunan desa
  - 143.4 Kekayaan desa
- 144 Lembaga-lembaga tingkat desa / kelurahan
  - 144.1 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
- 145 Administrasi desa
- 146 Kewilayahan
  - 146.1 Perubahan desa menjadi kelurahan
  - 146.2 Penggabungan / Pembentukan desa
  - 146.3 Perubahan batas wilayah / perluasan desa / kelurahan
  - 146.4 Perubahan nama-nama desa / kelurahan
  - 146.5 Permasalahan Batas Desa
  - 146.6 Penghapusan desa / kelurahan
- 147 RT-RW
- 148 Pembangunan Desa
  - 148.1 Pembinaan usaha gotong royong
    - 148.1.1 Swadaya gotong royong
    - 148.1.2 Lembaga Sosial Desa (LSD)
    - 148.1.3 Latihan kerja masyarakat
    - 148.1.4 Pembinaan Kesejahteraan keluarga (PKK)
    - 148.1.5 Penyuluhan
  - 148.2 Perekonomian Desa
    - 148.2.1 Produksi Desa
    - 148.2.2 Keuangan Desa
    - 148.2.3 Koperasi Desa
    - 148.2.4 Penataan bantuan pembangunan desa
    - 148.2.5 Alokasi bantuan pembangunan desa
    - 148.2.6 Pelaksanaan bantuan pembangunan desa
  - 148.3 Prasarana desa
    - 148.3.1 Pembinaan
      - 148.3.2 bimbingan teknis
      - 148.3.3 Pemukiman kembali penduduk
      - 148.3.4 Pemugaran perumahan dan lingkungan desa
  - 148.4 Pengembangan desa

- 148.4.1 Tata desa
- 148.4.2 Perlombaan desa
- 148.5 Koordinasi
- 148.5.1 Sektor Khusus
- 148.5.2 Rapat Koordinasi Horisontal (RKHO)
- 148.5.3 Team koordinasi pusat
- 148.5.4 Kerjasama
- 149 -

## **150 LEGISLATIF MPR / DPR / DPD**

- 151 Keanggotaan MPR
- 151.1 Pencalonan
- 151.2 Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah
- 151.3 Pemberhentian
- 151.3.1 Recall
- 151.3.2 Meninggal
- 151.4 Pelanggaran
- 151.5 Pergantian Antar Waktu
- 152 Persidangan
- 152.1 Keuangan
- 152.2 Penghargaan
- 153 Keanggotaan DPD
- 153.1 Pencalonan
- 153.2 Pengangkatan dan pengambilan sumpah
- 154 Hak
- 155 Keanggotaan DPR
- 155.1 Pencalonan
- 155.2 Pengangkatan
- 155.3 Pemberhentian
- 155.3.1 Recall
- 155.3.2 Meninggal
- 155.4 Pelanggaran
- 155.5 Pergantiaan antara waktu
- 156 Persidangan
- 156.1 Sidang Pleno
- 156.2 Dengar pendapat
- 156.3 Rapat Komisi
- 156.4 Reses
- 157 Jawaban pemerintah
- 157.1 Keuangan
- 157.2 Penghargaan
- 158 Kunjungan Kerja
- 159 Hak

## **160 DPRD PROVINSI**

- 161 Keanggotaan
- 161.1 Pencalonan
- 161.2 Pengangkatan
- 161.3 Pemberhentian
- 161.3.1 Recall
- 161.3.2 Meninggal
- 161.4 Pelanggaran
- 161.5 Alat kelengkapan dewan

161.5.1	Pimpinan
161.5.2	Badan Musyawarah
161.5.3	Komisi
161.5.4	Badan Legislasi Daerah
161.5.5	Badan Anggaran
161.5.6	Badan Kehormatan
161.5.7	Kelengkapan
162	Persidangan
162.1	Sidang Pleno
162.1.1	Rapat paripurna, rapat paripurna istimewa
162.1.2	Rapat pimpinan DPRD
162.1.3	Rapat badan musyawarah, rapat badan anggaran, rapat badan legislasi, rapat badan kehormatan, rapat pansus
162.1.4	Rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat konsultasi
162.1.5	Rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengan pendapat umum, rapat padangan umum
162.1.6	Rapat fraksi
162.2	Fraksi
162.3	Tata tertib
162.4	Kode etik
162.5	Reses
162.6	Peninjauan/kunjungan lapangan
162.7	Kunjungan kerja/studi banding/konsultasi
163	Kesejahteraan
163.1	Keuangan
163.2	Penghargaan
164	Hak
165	-
166	-
167	-
168	-
169	-

**170 DPRD KABUPATEN / KOTA**

171	Keanggotaan
171.1	Pencalonan
171.2	Pengangkatan
171.3	Penggantian antara waktu (PAW)
171.4	Pemberhentian
171.4.1	Recall
171.4.2	Meninggal
171.4.3	Diberhentikan
171.5	Alat kelengkapan dewan
171.5.1	Pimpinan
171.5.2	Badan musyawarah
171.5.3	Komisi
171.5.4	Badan legislasi daerah
171.5.5	Badan anggaran
171.5.6	Badan kehormatan
171.5.7	Alat kelengkapan lain (Pansus)
172	Persidangan
172.1	Rapat-rapat
172.1.1	Rapat paripurna, rapat paripurna istimewa

- 172.1.2 Rapat pimpinan DPRD
- 172.1.3 Rapat badan musyawarah, rapat badan anggaran, rapat badan legislasi, rapat badan kehormatan, rapat pansus
- 172.1.4 Rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat konsultasi
- 172.1.5 Rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, rapat pandangan umum
- 172.1.6 Rapat fraksi
- 172.2 Fraksi
- 172.3 Tata tertib
- 172.4 Kode etik
- 172.5 Reses
- 172.6 Peninjauan/kunjungan lapangan
- 172.7 Kunjungan kerja/studi banding
- 173 Kesejahteraan
- 173.1 Keuangan
- 173.2 Penghargaan
- 174 Hak
- 175 -
- 176 -
- 177 -
- 178 -
- 179 -

## **180 HUKUM**

- 180.1 Konstitusi
- 180.1.1 Dasar Negara
- 180.1.2 Undang-Undang Dasar
- 180.1.3 Undang-Undang
- 180.1.4 Peraturan Pemerintah
- 180.1.5 Keppres/Perpres/Inpres
- 180.1.6 Kepmen/Permen/Inmen
- 180.1.7 Perundangan Tingkat Provinsi
- 180.1.8 Perundangan Tingkat Kabupaten
- 180.1.9 Perundangan Tingkat Desa
- 180.2 Tap MPR
- 181 Perdata
- 181.1 Pertanahan
- 182 Pidana
- 183 Peradilan
- 183.1 Jenis-jenis peradilan
- 183.1.1 Peradilan umum
- 183.1.1.1 Peradilan Negeri Tingkat Pertama
- 183.1.1.2 Pengadilan Negeri
- 183.1.1.3 Mahkamah Agung
- 183.1.2 Peradilan Agama Islam
- 183.1.2.1 Pengadilan Agama Islam Tingkat Pertama
- 183.1.2.2 Pengadilan Tinggi Agama Islam
- 183.1.2.3 Mahkamah Agung Agama Islam
- 183.1.3 Peradilan Militer
- 183.1.3.1 Mahkamah Militer Tingkat Pertama
- 183.1.3.2 Mahkamah Militer Tinggi
- 183.1.3.3 Mahkamah Agung Militer
- 183.1.4 Peradilan Tata Usaha Negara



183.1.4.1	Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama
183.1.4.2	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
183.1.4.3	Mahkamah Agung Tata Usaha Negara
183.1.5	Mahkamah Konstitusi
183.2	Upaya Hukum
183.2.1	Banding
183.2.2	Kasasi
183.2.3	Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet)
183.2.4	Peninjauan Kembali
183.3	Eksekusi
183.4	Pembinaan / Penyuluhan Hukum
183.4.1	Pembinaan kesadaran hukum (KADARKUM)
183.5	Bantuan Hukum
183.5.1	Lembaga Bantuan Hukum
184	Hukum Internasional
185	Imigrasi
185.1	Visa
185.2	Paspor
185.3	Pembebasan narapidana
185.4	Tahanan titipan
186	Kepenjaraan
187	Lembaga Hukum
187.1	Kejaksaan
187.2	Pengadilan
188	Peraturan Perundangan-Undangan
189	Hukum Adat

## **190 HUBUNGAN LUAR NEGERI**

191	Perwakilan Asing
192	Tamu Negara
193	Kerjasama dengan Negara Asing
194	Perwakilan RI di Luar Negeri
195	PBB
196	Laporan Luar Negeri
197	-
198	-
199	-

## **200 POLITIK**

201	Perencanaan dan Program pembinaan politik Luar Negeri
201.1	Pembinaan Ideologi Pancasila
201.2	Kesatuan Bangsa Organisasi Kekuatan Sosial Politik
201.3	Organisasi Kemasyarakatan
201.4	Pelaksanaan pembinaan politik dalam negeri termasuk laporannya
201.5	Keadaan Politik Luar Negeri
201.6	Pemberitahuan keadaan bahaya dan jam malam meliputi pemberitahuan, ketentuan pelaksanaan dan pengawasan
201.7	Hasil evaluasi dan tata pelaporan mengenai ipoleksosbud, Kamtibmas
201.8	Partai Politik
201.8.1	Pendirian / Pembentukan PARPOL

- 201.8.2 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PARPOL
- 201.8.3 Program Kerja, Data Kegiatan PARPOL
- 201.8.4 Pembinaan / koordinasi fasilitas PARPOL
- 201.8.5 Hasil Munas / Musda PARPOL
- 201.8.6 Struktur / Kepengurusan, Pengkaderan, dan Keanggotaan PARPOL
- 201.8.7 Data Inventaris dan Keuangan PARPOL
- 201.9 Partai / Organisasi Terlarang
- 201.9.1 Keputusan Pembubaran Partai / Organisasi Terlarang
- 201.9.2 Daftar dan Data pengurus anggota Partai / Organisasi Terlarang
- 201.9.3 Ijin meninggalkan tempat atau domisili bagi anggota Partai / Organisasi Terlarang
- 201.9.4 Daftar berkala mengenai keadaan Partai / Organisasi Terlarang
- 201.9.5 Laporan Umum mengenai keadaan anggota Partai / Organisasi Terlarang
- 202 Organisasi Kemasyarakatan
- 202.1 Pembentukan Organisasi
- 202.2 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
- 202.3 Kepengurusan dan Daftar Anggota Organisasi
- 202.4 Program Kerja Organisasi
- 202.5 Munas / Musda Provinsi/Kabupaten/Kota
- 202.6 Pembinaan Organisasi
- 202.7 Kegiatan Organisasi
- 202.8 Daftar Inventarisasi Kekayaan Organisasi
- 202.9 Lembaga Swadaya Masyarakat
- 202.9.1 Pembentukan Organisasi
- 202.9.2 Kepengurusan dan Daftar Anggota Organisasi
- 202.9.3 Kepengurusan Dasar dan Daftar Anggota Organisasi
- 202.9.4 Program Kerja Organisasi
- 202.9.5 Laporan Kegiatan Organisasi
- 203 Orde Pemerintahan
- 203.1 Orde Lama
- 203.2 Orde Baru
- 203.3 Orde Reformasi
- 204 -
- 205 -
- 206 -
- 207 -
- 208 -
- 209 -
- 210 KEPARTAIAN**
- 211 Partai Politik
- 211.1 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
- 211.2 Program Kerja, Data Kegiatan PARPOL
- 211.3 Pembinaan PARPOL
- 211.4 Hasil Munas/Musda PARPOL
- 211.5 Struktur Kepengurusan, Pengkaderan, dan keanggotaan PARPOL
- 211.6 Data Inventaris dan Keuangan PARPOL
- 212 Partai/Organisasi terlarang
- 212.1 Keputusan Pembubaran Partai
- 212.2 Daftar dan Data Pengurus Anggota Partai

- 212.3 Ijin Meninggalkan Tempat
- 212.4 Daftar Berkala Mengenai Keadaan Anggota Partai
- 212.5 Laporan Umum Mengenai Keadaan Anggota Partai
- 213 -
- 214 -
- 215 -
- 216 -
- 217 -
- 218 -
- 219 -

## **220 ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

- 221 Pembentukan Organisasi
- 221.1 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
- 221.2 Kepengurusan dan Daftar Anggota Organisasi
- 221.3 Program Kerja Organisasi
- 221.4 Munas/Musda Provinsi/Kabupaten/Kota
- 222 Pembinaan Organisasi
- 222.1 Kegiatan Organisasi dan Pendapatannya
- 222.2 Daftar Inventaris Kekayaan Organisasi
- 223 Berdasarkan Kerokhanian Islam
- 223.1 Muhammadiyah
- 223.2 NU
- 223.3 Persatuan Syarikat Islam
- 223.4 Lembaga lainnya
- 224 Berdasarkan Kerokhanian Kristen
- 225 Berdasarkan Kerokhanian Katholik
- 226 Berdasarkan Kerokhanian Hindu
- 227 Berdasarkan Kerokhanian Budha
- 228 IKA (Ikatan Keluarga Alumni)
- 229 Berdasarkan Kesosialan

## **230 ORGANISASI PROFESI DAN FUNGSIONAL**

- 231 Ikatan Profesi Kesehatan
- 231.1 Ikatan Dokter Indonesia
- 231.2 Ikatan Bidan Indonesia
- 231.3 Ikatan Perawat Indonesia
- 231.4 Organisasi Lainnya
- 232 Organisasi Profesi Guru
- 232.1 Persatuan Guru Republik Indonesia
- 232.2 Ikatan Guru TK Indonesia
- 232.3 Persatuan Lainnya
- 233 Persatuan Sarjana Hukum Indonesia
- 234 Persatuan Advokat Indonesia
- 235 Lembaga Bantuan Hukum
- 236 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)
- 237 Persatuan Wartawan Indonesia
- 238 Ikatan Arsiparis / Pustakawan Indonesia
- 239 Ikatan Lainnya

## **240 ORGANISASI PEMUDA**

- 241 Pembentukan Organisasi
- 241.1 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

241.2	Kepengurusan dan Daftar Anggota Organisasi
241.3	Program Kerja Organisasi
241.4	Munas/Musda Provinsi/Kabupaten/Kota
242	Pembinaan Organisasi
242.1	Kegiatan Organisasi dan Pelaporan
242.2	Daftar Inventaris Kekayaan Organisasi
243	Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI)
244	Organisasi Mahasiswa
245	Organisasi Pelajar
246	Gerakan Pemuda Ansor
247	Gerakan Pemuda Islam Indonesia
248	Gerakan Pemuda Marhenis
249	-

## **250 ORGANISASI BURUH, TANI , DAN NELAYAN**

251	Pembentukan Organisasi
251.1	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
251.2	Kepengurusan dan Daftar Anggota Organisasi
251.3	Program Kerja Organisasi
251.4	Munas/Musda Provinsi dan Kabupaten/Kota
252	Pembinaan organisasi
252.1	Kegiatan organisasi dan pelaporannya
252.2	Daftar inventaris kekayaan organisasi
253	Federasi Buruh Seluruh Indonesia
254	Organisasi Buruh Internasional
255	Himpunan Kerukunan Tani Indonesia
256	Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia
257	-
258	-
259	-

## **260 ORGANISASI WANITA**

261	Pembentukan Organisasi
261.1	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
261.2	Kepengurusan dan Daftar Anggota Organisasi
261.3	Program Kerja Organisasi
261.4	Munas/Musda Provinsi/Kabupaten/Kota
262	Pembinaan Organisasi
262.1	Kegiatan Organisasi dan Pelaporannya
262.2	Daftar Inventaris Kekayaan Organisasi
263	Dharma Wanita
264	Kongres Wanita Indonesia
265	Persatuan Wanita Republik Indonesia
266	-
267	-
268	-
269	-

## **270 PEMILIHAN UMUM**

271	Pencalonan
272	Tanda Gambar
273	Kampanye
273.1	Dana Kampanye

274	Petugas Pemilu
274.1	KPU
274.2	PPK
274.3	PPS
274.4	KPPS
274.5	Pemantau
275	Pemilih
275.1	Pendaftaran pemilih
275.2	Daftar pemilih sementara
275.3	Daftar pemilih tambahan
275.4	Daftar pemilih tetap
275.5	Kartu pemilih
276	Sarana
276.1	TPS
276.2	Kendaraan
276.3	Surat Suara
276.4	Kotak Suara
276.5	Bilik suara
277	Pemungutan Suara
277.1	Pemungutan suara dan Penghitungan Suara
277.2	Rekapitulasi Penghitungan Suara
278	Hasil Pemilu
278.1	Penetapan Terpilih dan pembagian kursi anggota legislatif
278.2	Penetapan pemilihan pilkada
279	-

**280 PANWASLU**

280.1	Panwaslu Provinsi
280.2	Panwaslu Kabupaten/Kota
280.3	Panwaslu Kecamatan
281	Pelanggaran Pemilu
282	Sengketa Pemilu
283	Pemantauan
284	-
285	-
286	-
287	-
288	-
289	-
<b>290</b>	-
291	-
292	-
293	-
294	-
295	-
296	-
297	-
298	-
299	-

**300 KEAMANAN DAN KETERTIBAN**

300.1	Kebijakan Pemerintah mengenai situasi dan kondisi keamanan
-------	--

- 300.2 Pembinaan dan pengaturan mengenai larangan
- 300.3 Pencegahan penanggulangan gangguan / ancaman keamanan / ketertiban umum
- 300.4 Prosedur tetap operasional ketentraman dan ketertiban umum
- 301 Koordinasi dan kerjasama keamanan dan ketertiban umum (Trantibum)
- 302 Pengawasan Trantibum
- 303 Penegakan pelaksanaan Perda
- 304 Pembinaan penyuluhan pelanggaran Perda
- 305 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
- 306 Patroli wilayah
  - 306.1 Pengamanan
  - 306.2 Pengawasan
- 307 Pemberitahuan keadaan bahaya dan jam malam meliputi pemberitahuan, ketentuan pelaksanaan dan pengawasan
- 308 -
- 309 -
- 310 PERTAHANAN**
- 311 Darat
- 312 Laut
- 313 Udara
- 314 Ketahanan bangsa
- 315 Ketahanan ekonomi
- 316 Ketahanan Seni dan Budaya, Agama dan Kemasyarakatan
- 317 -
- 318 -
- 319 -
- 320 KEMILITERAN/TNI/POLRI**
- 321 Latihan Militer
- 322 Wajib Militer
- 323 Operasi Militer
- 324 Teritorial TNI/POLRI
- 325 Kekaryaannya TNI
- 326 Kemanunggalan TNI dengan rakyat
- 327 -
- 328 -
- 329 -
- 330 KEAMANAN**
- 331 Kepolisian
  - 331.1 Polisi Pamong Praja
- 332 Huru-hara/Demonstrasi
- 333 Senjata api/tajam
- 334 Bahan peledak
- 335 Perjudian
- 336 Surat-surat kaleng
- 337 Pengaduan masyarakat
- 338 Himbuan atau larangan
- 339 -
- 340 PERTAHANAN SIPIL/LINMAS**
- 340.1 Kebijakan pemerintah mengenai pembentukan Manwil dan Matrik Hansip/Linmas

- 340.1.1 Pengangkatan/pemberhentian anggota Hansip/Linmas
- 340.1.2 Pengerahan dan pengendalian Hansip/Linmas
- 340.1.3 Kegiatan pelaksanaan matrik Hansip/Linmas dan Menwa
- 340.1.4 Pembinaan anggota Hansip/Linmas
- 340.1.5 Penghargaan anggota Hansip/Linmas
- 340.1.6 Hansip/Linmas lanjut usia
- 340.1.7 Data matrik Hansip/Linmas dan Menwa
- 340.1.8 Pendidikan/Latihan Hansip/Linmas dan Menwa
- 340.1.9 Latihan keterampilan PAM Swakarsa
- 340.2 Pemberian tali asih bagi anggota Hansip/Linmas
- 341 Orientasi kesadaran bela bangsa
- 341.1 Orientasi kesadaran bela negara bagi tokoh agama dan masyarakat
- 341.2 Orientasi kesadaran bela negara bagi tokoh pemuda dan pelajar
- 342 -
- 343 -
- 344 -
- 345 -
- 346 -
- 347 -
- 348 -
- 349 -

## **350 KEJAHATAN**

- 351 Makar / pemberontakan
- 352 Penganiayaan, Pembunuhan
- 353 Pencurian, perampasan, perampokan
- 354 Penyelundupan narkoba
- 355 Pemalsuan, pengelapan
- 355.1 Uang
- 355.2 Ijazah
- 355.3 Kejahatan pemalsuan lainnya
- 356 Korupsi / Penyelewengan / Penyalahgunaan Jabatan
- 357 Kekerasan pada perempuan dan anak
- 357.1 Pelaporan
- 357.2 Penanganan korban
- 358 Kenakalan
- 359 Kejahatan lainnya

## **360 BENCANA**

- 360.1 Pelatihan
- 360.2 Surat keputusan
- 360.3 Berita acara
- 361 Gunung berapi/gempa
- 362 Banjir/Tanah longsor
- 363 Angin Topan
- 364 Kebakaran
- 364.1 Pemadam kebakaran
- 365 Kekeringan
- 366 Posko bencana
- 367 Koordinasi/unsur penggarahan penanggulangan bencana
- 368 MOU Pemerintah Pusat BNPB
- 369 -

- 370 KECELAKAAN**  
(Klasifikasi disini : SAR)
- 371 Latihan SAR anggota Menwa
  - 372 Latihan Keterampilan penyelamatan di air dan menyelam
  - 373 Pelatihan manajemen bagi pejabat
  - 374 Satkorlak dan Satlak PBP
  - 375 Pelatihan kemampuan Pusdalop bagi aparat PBP
  - 376 Latihan keterampilan pemadam kebakaran
  - 377 Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya
  - 378 Investigasi/penyelidikan kecelakaan
  - 379 Asuransi kecelakaan
- 380 PENDAMPINGAN REHABILITAS DAN REKONSTRUKSI**
- 381 Perencanaan (Perencanaan teknis, Rekomendasi)
  - 382 Bantuan Bencana
  - 383 Penanggulangan Bencana dengan pihak lain
  - 384 Sarana prasarana rehabilitasi dan rekonstruksi
  - 385 PUSDALOPS-PB (Pusat Pengendalian Operasi-Penanggulangan Bencana)
  - 386 Kunjungan lapangan
  - 387 Relawan
  - 388 Laporan bencana
  - 389 -
- 390 KERJASAMA BPBD DENGAN INSTANSI LAIN**
- 391 Lembaga Pemerintah Pusat
  - 392 Lembaga Pemerintah di Daerah
  - 393 Lembaga Internasional
  - 394 Lembaga Non Pemerintah Nasional
  - 395 -
  - 396 -
  - 397 -
  - 398 -
  - 399 -
- 400 KESEJAHTERAAN RAKYAT**
- 401 Kebijakan dan program pemerintah untuk kesejahteraan rakyat
  - 401.1 Bantuan Langsung Tunai (BLT)
  - 401.2 Beras untuk Rakyat Miskin (Raskin) / Beras Kesejahteraan (Rastra)
  - 402 -
  - 403 -
  - 404 -
  - 405 -
  - 406 -
  - 407 -
  - 408 -
  - 409 -
- 410 PEMBANGUNAN DESA**
- 411 Pembinaan Usaha Gotong royong
  - 411.1 Swadaya Gotong royong
  - 411.1.1 Penataan Gotong royong
  - 411.1.2 Gotong royong dinamis



- 411.1.3 Gotong royong statis
- 411.1.4 Pungutan
- 411.2 Lembaga Sosial Desa (LSD)
  - 411.2.1 Pembinaan
  - 411.2.2 Klasifikasi
  - 411.2.3 Proyek
  - 411.2.4 Musyawarah
- 411.3 Latihan Kerja Masyarakat
  - 411.3.1 Kader Masyarakat
  - 411.3.2 Kuliah Kerja Nyata (KKN)
  - 411.3.3 Pusat Latihan
  - 411.3.4 Kursus-kursus
  - 411.3.5 Kurikulum Silabus
  - 411.3.6 Ketrampilan
  - 411.3.7 Balai Latihan Kerja
- 411.4 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ( PKK)
  - 411.4.1 Program
  - 411.4.2 Pembinaan Organisasi
  - 411.4.3 Kegiatan
  - 411.4.4 Laporan
- 411.5 Penyuluhan
  - 411.5.1 Publikasi
  - 411.5.2 Peragaan
  - 411.5.3 Siaran pedesaan
  - 411.5.4 Penyuluh Lapangan
- 411.6 Kelembagaan Desa
  - 411.6.1 Kelompok Tani
  - 411.6.2 Rukun Tani
  - 411.6.3 Subak
  - 411.6.4 Dharma Tirta
- 412 Perekonomian Desa
  - 412.1 Produksi Desa
    - 412.1.1 Pengolahan
    - 412.1.2 Pemasaran
  - 412.2 Keuangan Desa
    - 412.2.1 Perkreditan Desa
    - 412.2.2 Inventarisasi Data
    - 412.2.3 Perkembangan / Pelaksanaan
    - 412.2.4 Bantuan / Stimulasi
    - 412.2.5 Petunjuk / pembinaan pelaksanaan
  - 412.3 Koperasi Desa
    - 412.3.1 Badan Usaha Unit Desa (BUUD/BUMDes)
  - 412.4 Penataan Bantuan Pembanguna Desa
    - 412.4.1 Jumlah Desa yang diberi bantuan
    - 412.4.2 Pengarahan
    - 412.4.3 Pusat
    - 412.4.4 Daerah
  - 412.5 Alokasi Bantuan pembangunan Desa
    - 412.5.1 Pusat
    - 412.5.2 Daerah
  - 412.6 Alokasi Bantuan Pembangunan Desa
    - 412.6.1 Bantuan Langsung
    - 412.6.2 Bantuan Keserasian

- 412.6.3 Bantuan Juara Lomba Desa
- 413 Prasarana Desa
  - 413.1 Prasarana Desa
    - 413.1.1 Pembinaan
    - 413.1.2 Bimbingan Teknis
  - 413.2 Pemukiman Kembali Penduduk
    - 413.2.1 Lokasi
    - 413.2.2 Diskusi
    - 413.2.3 Pelaksanaan
  - 413.3 Masyarakat Pradesa
    - 413.3.1 Pembinaan
    - 413.3.2 Penyuluhan
  - 413.4 Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa
    - 413.4.1 Rumah Sakit
    - 413.4.2 Proyek Perintis pelaksanaan
    - 413.4.3 Pengembangan
    - 413.4.4 Perbaikan Kampung
- 414 Pengembangan Desa
  - 414.1 Tingkat Perkembangan Desa
    - 414.1.1 Jumlah Desa
    - 414.1.2 Pemekaran Desa
    - 414.1.3 Pembentukan Desa Baru
    - 414.1.4 Evaluasi
    - 414.1.5 Bagian
  - 414.2 Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP), Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Desa
    - 414.2.1 Penyuluhan Program/Fasilitas Program
    - 414.2.2 Lokasi UDKP
    - 414.2.3 Pelaksanaan
    - 414.2.4 Bimbingan/pembinaan
    - 414.2.5 Evaluasi
  - 414.3 Tata Desa/profil Desa dan Kelurahan
    - 414.3.1 Inventarisasi
    - 414.3.2 Penyuluhan Pola Tata Desa
    - 414.3.3 Pemetaan
    - 414.3.4 Pedoman Pelaksanaan
    - 414.3.5 Evaluasi
  - 414.4 Perlombaan Desa
    - 414.4.1 Pedoman
    - 414.4.2 Penilaian
    - 414.4.3 Kejuaraan
    - 414.4.4 Piagam
- 415 Koordinasi
  - 415.1 Sektor Usaha
  - 415.2 Rapat Koordinasi Horisontal
  - 415.3 Team Koordinasi Pusat (TKP)
  - 415.4 Kerjasama
    - 415.4.1 Luar Negeri (Unicef)
    - 415.4.2 Perguruan Tinggi
    - 415.4.3 Depertemen/Lembaga Non Depertemen
- 416 Sedekah Bumi
  - 416.1 Sedekah Bumi
  - 416.2 Obor-obor

- 416.3 Lomba
- 417 -
- 418 -
- 419 -
- 420 PENDIDIKAN**
- Pendidikan Khusus
- (Klasifikasi disini : Pendidikan Putra-putri Papua)
- 420.1 Kebijakan dan program pemertintah untuk pendidikan
- 420.2 Pendidikan karakter bangsa, wawasan kebangsaan, jiwa nasionalisme, dan sebagainya
- 420.3 Pendidikan kemasyarakatan
- 421 Sekolah
- 421.1 Pra Sekolah
- 421.2 Sekolah Dasar
- 421.3 Sekolah menengah
- 421.4 Sekolah Kejuruan
- 421.5 Sekolah Tinggi
- 421.6 Kegiatan Sekolah, Dies Natalis, Lustrum, Wisuda
- 421.7 Kegiatan Pelajar, Reuni, Darmawisata, Lomba
- Klasifikasi disini : Pelajar teladan, pertukaran pelajar
- 421.8 Sekolah Pendidikan Luar Biasa
- 421.9 Pendidikan Luar Sekolah/Pemberantasan Buta Huruf
- 421.10 Perijinan
- 421.10.1 Pendidikan formal
- 421.10.2 Pendidikan non formal
- 422 Administrasi Sekolah
- 422.1 Persyaratan Masuk Sekolah, Testing, Ujian, Pendaftaran, Mapram, Perploncoan , OSPEK
- 422.2 Tahun Pelajaran
- 422.3 Hari Libur
- 422.4 Uang Sekolah, Bantuan Operasional Sekolah, SPP
- 422.5 Beasiswa
- 422.6 Ijazah
- 422.7 Supervisi (penilaian, pengawasan, pembinaan)
- 423 Metode Belajar
- 423.1 KBM (Kegiatan Belajar Mengajar)
- 423.2 Kuliah
- 423.3 Ceramah, Simposium, Seminar
- 423.4 Diskusi
- 423.5 Kuliah Lapangan, Widyawisata, KKN
- 423.6 Kurikulum
- 423.6.1 MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran)
- 423.7 Karya Tulis, Karya Ilmiah
- 423.8 Ujian
- 423.8.1 Remedial Teaching
- 424 Tenaga Pengajar : Guru, Dosen, Dekan, Rektor,
- Klafikasi disini : guru teladan
- 424.1 Pertukaran guru ke luar negeri
- 424.2 Sertifikasi guru
- 425 Sarana Pendidikan
- 425.1 Gedung/banguna pendidikan
- 425.1.1 Gedung Sekolah
- 425.1.2 Kampus

- 425.1.3 Pusat Kegiatan
- 425.1.4 Perpustakaan
- 425.1.5 Laboratorium
- 425.2 Buku
- 425.3 Perlengkapan pendidikan
- 425.4 Sistem Informasi Pendidikan
- 425.5 Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan
- 426 **KEOLAHRAGAAN**
- 426.1 Pembinaan Keolahragaan
  - 426.1.1 Olahraga Prestasi (PON, Sea Games, Kejurnas, Olimpiade)
  - 426.1.2 Olahraga Pendidikan (POPDA SD, PORSENI, dll)
  - 426.1.3 Olahraga Rekreasi / Massal (Senam, Sepeda Santai, Olahraga Tradisional)
  - 426.1.4 IPTEK dan Industri Olahraga
  - 426.1.5 Sarana dan Prasarana Keolahragaan
    - 426.1.5.1 Gedung Olahraga
    - 426.1.5.2 Stadion
    - 426.1.5.3 Lapangan Olahraga
    - 426.1.5.4 Kolam Renang
- 426.2 Kemitraan Olahraga
- 426.3 Hobi
  - 426.2.1 Gedung olahraga
  - 426.2.2 Stadion
  - 426.2.3 Lapangan
  - 426.2.4 Kolam Renang
- 426.3 Pesta Olahraga
  - Klasifikasi disini : PON, PORSADA, Olimpiade, PORSENI,
- 426.4 Hobi
- 427 Kepemudaan
  - Meliputi organisasi dan kegiatan remaja
  - Klasifikasi disini : gelanggang remaja
  - 427.1 Pertukaran Pemuda
  - 427.2 Paskibra
  - 427.3 Kemitraan Pemuda
  - 427.4 Karang Taruna
- 428 Kepramukaan
- 429 Pendidikan Kedinasan
  - Untuk Depertemen Dalam Negeri lihat 890
- 430 KEBUDAYAAN**
- 430.1 Kebijakan dan Program Pemerintah untuk Kebudayaan
- 430.2 Pembinaan Bidang Kebudayaan
- 431 Kesenian
  - 431.1 Cabang Kesenian
  - 431.2 Sarana
    - 431.2.1 Gedung Kesenian
    - 431.2.2 Padepokan
    - 431.2.3 Lembaga Adat
  - 431.3 Usaha Pertunjukan
- 432 Kepurbakalaan
  - 432.1 Museum
  - 432.2 Peninggalan Kuno
    - 432.2.1 Candi, termasuk pemugaran
    - 432.2.2 Benda

- 433 Sejarah
- 434 Bahasa
- 435 Usaha Pertunjukan, hiburan, Kesenangan
- 436 Kepercayaan
- 437 Festival, Pentas Seni
- 438 Pembinaan Organisasi Kesenian
- 439 -
- 440 KESEHATAN**
- 440.1 Kebijakan dan Program Pemerintah untuk Kesehatan
- 441 Pembinaan Kesehatan
  - 441.1 Gigi
  - 441.2 Mata
  - 441.3 Jiwa
  - 441.4 Kanker
  - 441.5 Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
  - 441.6 Perawatan
  - 441.7 Penyuluhan Kesehatan Masyarakat (PKM)
  - 441.8 Kesehatan Ibu dan Anak
  - 441.9 Sistem Kesehatan Nasional
    - 441.9.1 JPS BK (Jaringan Pengaman Sosial Bidang Kesehatan)
    - 441.9.2 JAMKESMAS
    - 441.9.3 JAMKESDA
    - 441.9.4 JAMPERSAL
    - 441.9.5 BPJS
    - 441.9.6 Jaminan lainnya
- 442 Obat-obat
  - 442.1 Pengadaan
  - 442.2 penyimpanan
  - 442.3 Obat Generik
  - 442.4 Pemalsuan
  - 442.5 Obat terlarang
- 443 Pemberantasan Penyakit
  - 443.1 Pencegahan
  - 443.2 Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Menular Langsung (P2ML)
    - 443.2.1 Kusta
    - 443.2.2 Penyakit Kelamin, HIV, AIDS, IMS
    - 443.2.3 Frambusia
    - 443.2.4 TBC
  - 443.3 Epidemiology dan Karantina (Epidka)
    - 443.3.1 Kholera
    - 443.3.2 Imunisasi
    - 443.3.3 Surveilense
    - 443.3.4 Antrak
    - 443.3.5 Leptosirosis
    - 443.3.6 Chikungunya
    - 443.3.7 SARS
    - 443.3.8 Flu Burung (Avian Influenza)
  - 443.4 Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Menular Sumber Binatang (P2B)
    - 443.4.1 Malaria
    - 443.4.2 Dengue Haemorrhagie Fever (Demam Berdarah, DHF)
    - 443.4.3 Filaria

- 443.4.4 Serangga
- 443.4.5 Rabies
- 443.5 Higiene Sanitasi
- 443.5.1 Tempat-tempat Pembuatan dan Penjualan Makanan dan Minuman, Jasa boga (TPPMM)
- 443.5.2 Sarana Air Minum
- 443.5.3 Pestisida
- 443.5.4 Pencemaran Udara
- 443.5.5 Jamban Keluarga
- 443.5.6 Kesehatan Institusi
- 443.6 Pemberantasan penyakit tidak menular
- 443.6.1 A. Pektoris
- 443.6.2 IMA
- 443.6.3 Hipertensi
- 443.6.4 Stroke
- 443.6.5 Diabetes Militus (DM)
- 443.6.6 CA (Kanker) Serviks
- 443.6.7 CA (Kanker) Mammae
- 443.6.8 CA (Kanker) Hepar
- 443.6.9 CA (Kanker) Paru
- 443.7 DEKOPENSATIOKORDIS
- 443.7.1 P P O M
- 443.7.2 Asma
- 443.7.3 Kecelakaan Lalu Lintas
- 443.7.4 Psikosis
- 444 Gizi
- 444.1 Kekurangan Makanan
- 444.2 Bahaya kelaparan, busung lapar
- 444.3 Keracunan makanan
- 444.4 Menu makanan rakyat
- 444.5 Gondok endemik (GAKY)
- 445 RSUP, RSJ, RS Khusus
- 445.1 Pelayanan Medis (termasuk surat keterangan berkaitan dengan kondisi pasien, visum)
- 445.1.1 Rawat Inap
- 445.1.2 Rawat Jalan
- 445.1.3 IGD
- 445.1.4 IBS
- 445.1.5 ICU
- 445.1.6 MCU (Medical Check Up)
- 445.2 Penunjang Medis
- 445.2.1 Farmasi
- 445.2.2 Rekam Medik
- 445.2.3 Radiologi
- 445.2.4 Gizi
- 445.2.5 Laboratorium Klinik
- 445.2.6 Laboratorium Patalogi Anatomi, Forensik
- 445.2.7 Bank Darah Rumah Sakit
- 445.2.8 Sanitasi Rumah Sakit
- 445.2.9 CSSD / Laundry
- 445.3 Keperawatan
- 445.4 Komite Medik
- 445.5 SPI (Satuan Pengawas Internal)

- 445.6 Mutu Rumah Sakit
  - 445.6.1 Akreditasi
  - 445.6.2 ISO
  - 445.6.3 PSBH (Problem Solving for Better Hospital)
  - 445.6.4 IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
  - 445.7 IPAL (Instalasi Pengolahan Limbah)
  - 445.8 Promosi Layanan Kesehatan
  - 445.9 Kasus Hukum Rumah Sakit
- 446 Tenaga Medis
  - 446.1 Perencanaan Tenaga Medis
  - 446.2 Pendayagunaan Tenaga Medis
    - 446.2.1 Perijinan untuk Tenaga Medis
    - 446.2.2 Kegiatan Bakti Sosial untuk Tenaga Medis
    - 446.2.3 TKHI (Tenaga Kesehatan Haji Indonesia)
  - 446.3 Diklat Tenaga Kesehatan / Medis
  - 446.4 Diklat Tenaga Kesehatan / Para Medis
  - 446.5 Pendidikan di Bidang Kesehatan termasuk pendidikan spesialis
- 447 Peralatan Kesehatan
  - 447.1 Standarisasi
  - 447.2 Penyimpanan
  - 447.3 Distribusi
  - 447.4 Perijinan berkaitan dengan alat kesehatan
- 448 Pengobatan Alternatif
  - 448.1 Pijat
  - 448.2 Akupunktur
  - 448.3 Jamu dan Herbal
  - 448.4 Dukun
- 449 Lembaga Penyedia Layanan Kesehatan
  - 449.1 PUSKESMAS dan PUSKESMAS Keliling
  - 449.2 Poliklinik dan Balai Kesehatan
  - 449.3 Rumah Bersalin
  - 449.4 POSYANDU
  - 449.5 Laboratorium Kesehatan
  - 449.6 Apotek
  - 449.7 Sanatorium Kesehatan
- 450 AGAMA**
  - 450.1 Kebijakan dan Program Pemerintah dalam Pembinaan dan Pengawasan Bidang Keagamaan
  - 450.2 Bantuan di bidang keagamaan
  - 451 Islam
    - 451.1 Peribadatan
      - 451.1.1 Sholat
      - 451.1.2 Zakat, Infaq, Shodaqoh, Amal
      - 451.1.3 Puasa
      - 451.1.4 Umroh dan Haji
    - 451.2 Tempat Ibadah (Masjid, Musholla, Surau)
    - 451.3 Tokoh Agama
    - 451.4 Pendidikan Agama
      - 451.4.1 Pendidikan Tinggi Agama
      - 451.4.2 Menengah, MTs, MA
      - 451.4.3 Dasar, Prasekolah, MI
      - 451.4.4 Lembaga Pendidikan Non Formal (TPQ / Madrasah Diniyah, Pondok Pesantren, dll)

- 451.4.5 Sarana Pendidikan meliputi Buku, Gedung Sekolah, dll.
- 451.4.6 Tenaga Pengajar
- 451.4.7 Dakwah (Pengajian, MTQ)
- 451.5 Wakaf
- 451.6 Mashab Agama Islam
- 451.7 Organisasi keagamaan bukan politik (Majelis Ulama Indonesi, Dewan Hisah Rukyat, dll)
- 451.8 Tokoh Agama, Rohaniawan (Da'i)
- 452 Kristen Protestan
- 452.1 Peribadatan
- 452.2 Tempat Ibadah (Gereja, dll)
- 452.3 Tokoh Agama, Rohaniawan, Pendeta, Domine
- 452.4 Mazhab Agama Kristen Protestan
- 452.5 Organisasi Gerejani
- 453 Katholik
- 453.1 Peribadatan
- 453.2 Tempat Ibadah (Gereja, dll)
- 453.3 Tokoh Agama, Rokhaniawan, Pastur
- 453.4 Mazhab Agama Katholik
- 453.5 Organisasi Gerejani
- 454 Hindu
- 454.1 Peribadatan
- 454.2 Tempat Ibadah (Pura, dll)
- 454.3 Tokoh Agama, Rohaniawan
- 454.4 Mazhab Agama Hindu
- 454.5 Organisasi Agama Hindu
- 455 Budha
- 455.1 Peribadatan
- 455.2 Tempat Ibadah (Candi, Vihara, dll)
- 455.3 Tokoh Agama, Rohaniawan
- 455.4 Mazhab Agama Budha
- 455.5 Organisasi Agama Budha
- 456 Kong Hu Chu
- 456.1 Peribadatan
- 456.2 Tempat Ibadah (Kelenteng,dll)
- 456.3 Tokoh Agama, Rohaniawan
- 456.4 Mazhab Agama Kong Hu Chu
- 455.5 Organisasi Agama Kong Hu Chu
- 457 -
- 458 -
- 459 -
- 460 SOSIAL**
- 461 Rehabilitasi Penyandang Cacat
- 461.1 Cacat Ganda
- 461.2 Cacat Fisik
- 461.3 Cacat Mental
- 462 Rehabilitasi Sosial
- 462.1 Gelandangan / Orang Terlantar, Anak Jalanan
- 462.2 Pengemis
- 462.3 Tuna Susila
- 462.4 Anak Nakal
- 462.5 Tuna Wisma
- 463 Kesejahteraan Anak dan Keluarga



- 463.1 Kesejahteraan Anak
  - 463.1.1 Pengarusutamaan Hak-hak Anak (PUHA)
  - 463.1.2 Perlindungan Anak
    - 463.1.3 Anak Asuh
  - 463.2 Kualitas Hidup Perempuan
    - 463.2.1 Perlindungan Perempuan
    - 463.2.2 Ibu Teladan
    - 463.2.3 Pengarusutamaan Gender (PUG)
- 464 Keperintisan dan Kepahlawanan
  - 464.1 Pahlawan
    - Meliputi penghargaan kepada pahlawan, tunjangan kepada pahlawan, dan tandanya
  - 464.2 Perintis Kemerdekaan
    - Meliputi pembinaan, penghargaan kepada pahlawan, tunjangan kepada pahlawan, dan tandanya.
  - 464.3 Cacat Veteran
- 465 Kesejahteraan Sosial
  - 465.1 Lanjut Usia
  - 465.2 Korban kekacauan, pengungsian, rehabilitasi
  - 465.3 Masyarakat Miskin : Raskin, BLT, dll
- 466 Sumbangan Sosial
  - 466.1 Korban Bencana
    - 466.1.1 Jaminan Sosial
  - 466.2 Pencarian dana untuk sumbangan
    - Meliputi : penyelenggaraan undian, ketangkasan, bazar, dan sebagainya
  - 466.3 Panti Asuhan
- 467 Bimbingan Sosial
  - 467.1 Masyarakat Suku Terasing
    - Meliputi : Bimbingan Pendidikan, kesehatan, pemukiman, Pembinaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT), dsb
- 468 PMI (Palang Merah Indonesia)
- 469 Makam
  - 469.1 Umum
  - 469.2 Pahlawan
  - 469.3 Khusus, Keluarga, Raja
  - 469.4 Krematorium
- 470 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**
  - 470.1 Kebijakan dan program pemerintah untuk kependudukan
  - 471 Pendaftaran Penduduk
    - 471.1 Identitas Penduduk
      - 471.1.1 Biodata
      - 471.1.2 Nomer Induk Kependudukan
      - 471.1.3 Kartu Tanda Penduduk
      - 471.1.4 Kartu Keluarga
      - 471.1.5 Advokasi Identitas Penduduk
    - 471.2 WNI Keturunan Asing
      - 471.2.1 Permohonan Kewarganegaraan
      - 471.2.2 Permohonan Ganti Nama
    - 471.3 Asimilasi
  - 472 Kewarganegaraan Asing
  - 473 Tidak Berkewarganegaraan (State Less)
  - 474 Pendaftaran Penduduk

- 474.1 Kelahiran
- 474.1.1 Adopsi
- 474.2 Perkawinan / Perceraian / Rujuk
- 474.3 Kematian
- 474.4 Kartu Penduduk
- 475 Transmigrasi
- 475.1 Penyiapan Informasi Daerah Transmigrasi
- 475.1.1 Informasi potensi peluang bekerja dan berusaha di daerah transmigrasi
- 475.1.2 Perbandingan potensi daerah asal dan daerah transmigrasi
- 475.1.3 Pemasyarakatan / Sosialisasi Transmigrasi
- 475.1.4 Peran serta lembaga dan instansi terkait serta media massa dalam penyampaian informasi transmigrasi
- 475.1.5 Publikasi transmigrasi melalui pameran dan kesenian
- 475.1.6 Bimbingan dan penyuluhan transmigrasi bagi masyarakat daerah asal dan daerah transmigrasi
- 475.1.7 Kerja sama di bidang transmigrasi
- 475.1.8 Kepulauan transmigran karena daerah terjadi konflik
- 475.2 Pemukiman Transmigrasi
- 475.2.1 Penggunaan tanah pemukiman transmigrasi
- 475.2.2 Pengembangan, struktur wilayah, dan analisis data wilayah transmigrasi
- 475.2.3 Tata ruang satuan kawasan pengembangan, studi kelayakan dan dampak lingkungan transmigrasi
- 475.2.4 Teknis ruang satuan pemukiman dan lokasi / peta informasi pemukiman
- 475.2.5 Standarisasi dan Spesifikasi teknis rumah transmigran, fasilitas umum / sosial dan jaringan transportasi
- 475.2.6 Tanah pemukiman, pengadaan areal tanah dan pembebasannya, identifikasi, pengukuran dan pembuatan batas areal tanah
- 475.2.7 Penyelesaian masalah tanah di lokasi pemukiman transmigrasi
- 475.2.8 Tata ruang pemukiman transmigrasi
- 475.2.8.1 Rancangan dan pemanfaatan areal tanah
- 475.2.8.2 Rancangan kapling transmigrasi Swakarsa Mandiri
- 475.2.8.3 Pengukuran dan Pembagian lahan pekarangan, lahan usaha dan fasilitas umum
- 475.2.8.4 Penyelesaian kekurangan lahan usaha kepada transmigran dan sengketa tanah
- 475.2.8.5 Inventarisasi penataan kembali dan penggunaan areal tanah
- 475.2.8.6 Pengukuran batas unit pemukiman
- 475.2.8.7 Penyesuaian perubahan areal dan urusan perizinan pemanfaatan areal tanah
- 475.2.9 Sarana pemukiman transmigrasi
- 475.2.9.1 Pembinaan dan pengendalian, penyiapan bangunan rumah transmigrasi, jamban keluarga dan fasilitas umum
- 475.2.9.2 Pembinaan dan pengendalian penyiapan sarana air bersih
- 475.2.9.3 Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan sumber energi
- 475.2.9.4 pembinaan dan pengendalian peningkatan sarana
- 475.2.9.5 Pembinaan, pengendalian dan teknis peningkatan potensi lahan dan lingkungan
- 475.3 Pengarahan, pemindahan dan penempatan

- 475.3.1 Pengkajian dan pengembangan metode pengerahan dan penempatan
- 475.3.2 Teknis penyuluhan dan motivasi dalam pengerahan dan penempatan
- 475.3.3 Pengerahan
  - 475.3.3.1 Pendaftaran dan seleksi calon transmigran
  - 475.3.3.2 Berkas persyaratan dan administrasi calon transmigrasi
  - 475.3.3.3 Transmigran yang dinyatakan lulus penyaringan
- 475.3.4 Pemberangkatan transmigran
  - 475.3.4.1 Pengangkutan Transmigran Melalui Laut, Udara, dan Darat
  - 475.3.4.2 Jadwal dan Tempat pelaksanaan pemberangkatan
  - 475.3.4.3 Pelaksanaan pengurusan pemberangkatan
  - 475.3.4.4 Pengawasan perjalanan transmigran
  - 475.3.4.5 Pengaturan Rute Pemberangkatan
  - 475.3.4.6 Alokasi penempatan dan Surat perintah pemberangkatan
- 475.3.5 Penempatan Transmigran
  - 475.3.5.1 Kesiapan lokasi dan daya tampung
  - 475.3.5.2 Pendataan Transmigran di lokasi yang masih dibina
  - 475.3.5.3 Data Transmigran yang meninggalkan lokasi di setiap UPT
  - 475.3.5.4 Pemantauan penempatan transmigrasi pengganti
- 475.4 Penampungan transmigrasi (transito), dan pelatihan transmigran
  - 475.4.1 Pelatihan Transmigran
    - 475.4.1.1 Program pengajaran dan metode pelatihan
    - 475.4.1.2 Penyusunan silabus dan modul pelatihan
    - 475.4.1.3 Penyusunan calon peserta / pelatih
  - 475.4.2 Penampungan transmigran di transito
    - 475.4.2.1 Pelayanan kesehatan bagi transmigran
    - 475.4.2.2 Pelayanan makanan bagi transmigran
    - 475.4.2.3 Pelayanan perbekalan / peralatan bagi transmigran
- 475.5 Pembinaan masyarakat transmigrasi
  - 475.5.1 Identifikasi dan peninjauan pembinaan
    - 475.5.1.1 Identifikasi, analisis data, pedoman pelaksanaan rencana teknis, pembinaan tahap penyesuaian
    - 475.5.1.2 Identifikasi, analisis data, pedoman pelaksanaan rencana teknis, pembinaan tahap pengembangan
    - 475.5.1.3 Identifikasi, analisis data, pedoman pelaksanaan rencana teknis, pembinaan tahap pembinaan
  - 475.5.2 Pembinaan Pendidikan
    - 475.5.2.1 Penyediaan / Penyiapan sarana dan usaha pengembangan pendidikan
    - 475.5.2.2 Pelaksanaan penyiapan tenaga pendidikan dan status
  - 475.5.3 Pelaksanaan peningkatan partisipasi masyarakat
  - 475.5.4 Pembinaan kesehatan
    - 475.5.4.1 Penyediaan sarana kesehatan dan KB
    - 475.5.4.2 Penanggulangan penyakit dan kejadian luar biasa
    - 475.5.4.3 Pendistribusian bantuan pangan
  - 475.5.5 Pembinaan Rohani
    - 475.5.5.1 Bimbingan mental dan spiritual dan penyediaan petugas agama
    - 475.5.5.2 Bimbingan adaptasi masyarakat
    - 475.5.5.3 Bimbingan pelaksanaan menumbuhkan interaksi sosial
- 476 Keluarga Berencana
  - 476.1 Alat Kontrasepsi

- 476.2 KB Lestari
- 476.3 KB Mandiri
- 476.4 Penyuluhan Lapangan KB (PLKB)
- 476.4.1 Orientasi / Pelatihan BKB, UPPKS, PRKB, dll.
- 476.5 Pos KB Desa
- 476.6 Akseptor KB
- 476.6.1 Peran / Partisipasi Pria dalam ber KB
- 477 Catatan Sipil
- 478 Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
- 479 Keluarga Sejahtera
- 480 MEDIA MASA**
- 480.1 Kebijakan dan program pemerintah dalam bidang media
- 481 Media cetak meliputi perijinan hingga pencabutan ijin bila terjadi pelanggaran
  - 481.1 Penerbitan
    - 481.1.1 Surat Kabar
    - 481.1.2 Majalah
    - 481.1.3 Buletin
    - 481.1.4 Klarifikasi Berita
    - 481.1.5 Press Release
    - 481.1.6 Layanan Informasi / Leaflet
    - 481.1.7 Masukan Analisis Gubernur
    - 481.1.8 Jurnal Mingguan Ringkasan Berita
    - 481.1.9 Jurnal Mingguan Pendapat Umum
  - 481.2 Liputan Media Masa
    - 481.2.1 Liputan Rutin
    - 481.2.2 Liputan Khusus
      - 481.2.2.1 Arus Lebaran
  - 481.3 Pencabutan Surat Ijin
    - 481.3.1 Surat Kabar
    - 481.3.2 Majalah
    - 481.3.3 Buletin
  - 481.4 Laporan dan Hasil Pemberitaan
    - 481.4.1 Surat Kabar
    - 481.4.2 Majalah
    - 481.4.3 Buletin
    - 481.4.4 Kegiatan Bidang
    - 481.4.5 Grafika
- 482 Media Elektronik
  - Meliputi perijinan hingga encabutan ijin bila terjadi pelanggaran
  - 482.1 Radio
  - 482.2 Televisi
  - 482.3 Film Dokumenter
  - 482.4 Pengawasan Lembaga Penyiaran
  - 482.5 Kelompok Pemantau Isi Siaran
  - 482.6 Sumber Daya Manusia Penyiaran
  - 482.7 Film
- 483 Reklame
  - 483.1 Ketentuan Pemasangan
  - 483.2 Penerbitan
  - 483.3 Pameran Non Komersial
- 484 Kewartawanan
  - 484.1 Pembentukan Organisasi Profesi

- 484.2 Terjadinya kasus penghinaan, pemukulan, penganiayaan terhadap wartawan
- 484.3 Penyalahgunaan Profesi
- 484.4 Bantuan Kepada / Dari Organisasi Profesi Wartawan
- 484.5 Musyawarah Wartawan Indonesia
- 484.6 Kebijakan Pimpinan Wartawan / Pendidikan Jurnalistik
- 484.7 Temu Pers / Konferensi Pers
- 484.8 Pers Tour
- 484.9 Wawancara / Audiensi Wartawan
- 485 Penyuluhan Masyarakat
- 485.1 Publikasi
- 485.2 Pendirian Information Centre
- 486 Peningkatan Kapasitas Bidang Infokom
- 486.1 Training Fotografi
- 486.2 Training Berita Jurnalistik
- 486.3 Bintek Infokom
- 486.4 Rakorda Infokom
- 486.5 Rakor Pengendalian Kegiatan
- 487 Hubungan Antar Lembaga
- 487.1 Organisasi Kemasyarakatan
- 487.1.1 Wahana Komunikasi Masyarakat
- 487.1.2 Bintek Pengurus Lembaga Komunikasi Masyarakat
- 487.1.3 Bahan Informasi Cetak Lembaga Komunikasi Masyarakat
- 487.1.4 Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Media
- 487.1.5 Pelatihan Motivator
- 487.1.6 Pembekalan LKM / Upaya PPBN
- 487.1.7 Bahan Informasi Sosialisasi PPBN
- 487.2 Lembaga Pemerintah
- 487.2.1 Forum Informasi dan Kehumasan
- 487.2.2 Pertemuan Kehumasan
- 487.2.3 Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)
- 487.3 Luar Negeri
- 487.3.1 Promosi Luar Negeri
- 487.3.2 Kunjungan Wartawan Asing
- 488 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Informasi
- 488.1 Pembuatan Foto Blow Up Side
- 488.2 Tayangan Udara tentang Kebijakan dan Hasil Pembangunan
- 488.2.1 Bupati Menyapa
- 488.2.2 Diskusi Interaktif 1 Jam Bersama Bupati
- 488.2.3 Fokus Utama
- 488.3 Pelayanan Informasi melalui Feature
- 488.4 Pelayanan Informasi melalui Spot
- 488.4.1 Televisi
- 488.4.2 Radio
- 488.5 Pelayanan Informasi melalui Media Tradisional
- 488.5.1 Karawitan
- 488.5.2 Wayang Kulit
- 488.5.3 Guyon Maton
- 488.5.4 Emprak
- 488.6 Dialog Interaktif
- 489 Sistem Naskah Sosialisasi Kegiatan Bupati
- 489.1 Himpunan Naskah Sambutan

- 489.2 Klasifikasi Naskah Sambutan
- 489.3 Himpunan Dialog Interaktif
- 489.4 Himpunan Naskah Rubrik dan Keynote Speaker
- 489.5 Pembuatan Kolom Khusus Hasil-hasil Pembangunan

**490** -

- 491 -
- 492 -
- 493 -
- 494 -
- 495 -
- 496 -
- 497 -
- 498 -
- 499 -

**500 PEREKONOMIAN**

- 500.1 Dewan Stabilisasi
- 500.2 KADIN
- 501 Pengadaan Pangan
- 502 Pengadaan Sandang
- 503 Pengadaan Papan
- 504 Perizinan
  - 504.1 Ijin prinsip
  - 504.2 Ijin pertahanan
    - 504.2.1 Ijin Lokasi
    - 504.2.2 Ijin perubahan tanah pertanian ke non pertanian
    - 504.2.3 Ijin peruntukan Penggunaan tanah Pemda
  - 504.3 Ijin reklame
  - 504.4 Ijin pariwisata
  - 504.5 Ijin mendirikan bangunan
  - 504.6 Ijin Gangguan (HO)
  - 504.7 Ijin perdagangan
    - 504.7.1 Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
    - 504.7.2 Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
    - 504.7.3 Ijin Usaha Industri (IUI)
  - 504.8 Ijin angkutan
  - 504.9 Ijin-ijin lain
- 505 -
- 506 -
- 507 -
- 508 -
- 509 -

**510 PERDAGANGAN**

Klasifikasi disini : Tataniaga

- 510.1 Promosi perdagangan
  - 510.1.1 Pekan Raya
  - 510.1.2 Iklan
  - 510.1.3 Pameran
  - 510.1.4 Event-event
  - 510.1.5 Lomba-lomba (lomba desain, busana, kerajinan)
  - 510.1.6 Pasar
  - 510.1.7 Pertokoan, Kios, PKL
- 510.2 Pelelangan, Distribusi
  - 510.2.1 Pemasaran sembako

- 510.2.2 Pemasaran Hasil Industri
- 510.2.3 Penentuan Harga Pokok
- 510.3 Bina Usaha dan Sarana Perdagangan
  - 510.3.1 Rencana dan Program Kerja
  - 510.3.2 Pelaksanaan Pelayanan Administrasi
  - 510.3.3 Pelaksanaan Teknis
  - 510.3.4 Pemantauan
  - 510.3.5 Evaluasi dan Pelaporan
- 510.4 Perijinan
  - 510.4.1 Penerbitan SIUP
  - 510.4.2 Perpanjangan
  - 510.4.3 Ijin Prinsip
  - 510.4.4 Rekomendasi
- 510.5 Perdagangan antar Pulau
  - 510.5.1 Kerjasama bahan baku
  - 510.5.2 Industri Pemasaran
  - 510.5.3 Kontrak
- 510.6 Tera
  - 510.6.1 Tera Ulang Ukuran
  - 510.6.2 Takaran
  - 510.6.3 Timbangan
  - 510.6.4 Kalibrasi
  - 510.6.5 Cap tanda Tera
  - 510.6.6 Biaya Tera
- 510.7 Bantuan Peralatan
  - 510.7.1 Proposal
  - 510.7.2 Surat Perjanjian / Kontrak
  - 510.7.3 Serah Terima
- 510.8 Perijinan / Rekomendasi Tanda Pabrik
- 510.9 Kemetrolgian
  - 510.9.1 Standart Tingkat Tiga
  - 510.9.2 Standart Kerja Satuan Ukur
  - 510.9.3 Ukuran Metrologi
    - 510.9.3.1 Peralatan
    - 510.9.3.2 Laboratorium Metrologi
    - 510.9.3.3 Tangki Ukur Mobil
    - 510.9.3.4 Meter Taxi
    - 510.9.3.5 KWH Meter
    - 510.9.3.6 SPBU
- 511 Pemasaran
  - 511.1 Sembilan Bahan Pokok, tambahan kode wilayah beras, garam, minyak tanah, minyak goreng, sabun, dsb.
  - 511.2 Pasar
  - 511.3 Pertokoan, Kaki Lima, Kios
  - 511.4 Pusat Perbelanjaan
- 512 Ekspor
  - 512.1 Ekspor Hasil Industri
  - 512.2 Ijin Ekspor
  - 512.3 Pengembangan Pasar Luar Negeri
  - 512.4 Manajemen Perdagangan Internasional
  - 512.5 Kebijakan Ekspor
  - 512.6 Pemberitahuan Ekspor Barang
  - 512.7 Pengawasan Mutu Barang

- 512.8 Eksportir Terdaftar
- 512.9 Evaluasi dan Pelaporan
- 513 Impor
  - 513.1 Ijin Impor
    - 513.1.1 Pemberian Ijin
    - 513.1.2 Pengendalian Ijin
    - 513.1.3 Pemantauan Ijin
  - 513.2 Standar Mata Dagang Impor
  - 513.3 Manajemen Perdagangan Internasional
  - 513.4 Kegiatan Impor
    - 513.4.1 Pembinaan Impor
    - 513.4.2 Pengendalian Impor
    - 513.4.3 Pemantauan Impor
  - 513.5 Faktor-faktor Pendukung
  - 513.6 Pengawasan Mutu Barang Impor
  - 513.7 Penyaluran Kegiatan Impor
    - 513.7.1 Bahan Konsumsi
    - 513.7.2 Bahan Baku
    - 513.7.3 Bahan Penolong
  - 513.8 Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Impor
- 514 Perdagangan Antar Pulau
  - 514.1 Kerjasama Bahan Baku
  - 514.2 Industri Pemasaran
  - 514.3 Kontrak
- 515 Perdagangan Luar Negeri
  - 515.1 Pengembangan Potensi Luar Negeri
    - 515.1.1 Promosi dan Informasi
    - 515.1.2 Pameran
    - 515.1.3 Kerjasama
- 516 Pergudangan
  - 516.1 Peti Kemas
  - 516.2 Tangki Penyimpanan
- 517 Aneka Usaha Perdagangan
- 518 Koperasi
  - 518.1 Bina Usaha Koperasi
    - 518.1.1 Koperasi Pertanian dan Perkebunan
      - 518.1.1.1 Koperasi Pertanian Tanaman Pangan
      - 518.1.1.2 Koperasi Perkebunan
    - 518.1.2 Koperasi Perikanan dan Peternakan
      - 518.1.2.1 Koperasi Perikanan
      - 518.1.2.2 Koperasi Peternakan
    - 518.1.3 Permodalan Koperasi
      - 518.1.3.1 Pemupukan Modal
      - 518.1.3.2 Pemanfaatan Modal
      - 518.1.3.3 Perbankan dan Asuransi
      - 518.1.3.4 Permodalan Luar Koperasi
      - 518.1.3.5 Kredit Program Umum
      - 518.1.3.6 Kredit Program Khusus
    - 518.1.4 Distribusi dan Jasa Koperasi
      - 518.1.4.1 Distribusi Bahan Pokok
      - 518.1.4.2 Distribusi Aneka Bahan
      - 518.1.4.3 Distribusi Kerjasama Niaga



- 518.1.4.4 Jasa Angkutan
- 518.1.4.5 Jasa Perumahan
- 518.1.4.6 Aneka jasa
- 518.1.5 Koperasi kelistrikan, industri, dan telekomunikasi
- 518.1.5.1 Koperasi kelistrikan
- 518.1.5.2 Koperasi industri
- 518.1.5.3 Koperasi telekomunikasi
- 518.2 Bina Lembaga Koperasi
- 518.2.1 Organisasi Koperasi
- 518.2.1.1 Anggaran Dasar dan Akte Pendirian Koperasi
- 518.2.1.2 Pemberian Badan Hukum Koperasi
- 518.2.1.3 Penyelesaian Pembubaran Koperasi
- 518.2.1.4 Perangkaan Koperasi
- 518.2.1.5 Pengakuan Koperasi Sekolah
- 518.2.1.6 Amalgamasi
- 518.2.1.7 Tertib Organisasi Koperasi
- 518.2.1.8 Penyelesaian Perselisihan / Persengketaan
- 518.2.1.9 Bimbingan Kesadaran Hukum
- 518.2.2 Bina Hubungan Alat kelengkapan organisasi koperasi
- 518.2.2.1 Rapat Anggota Koperasi
- 518.2.2.2 Pengurus dan Badan Pemeriksaan
- 518.2.2.3 Hubungan dengan Dewan Koperasi Indonesia
- 518.2.2.4 Badan Penasehat dan Pertimbangan Koperasi Unit Desa (BPP KUD)
- 518.2.3 Bina Tata Laksana Koperasi
- 518.2.3.1 Klasifikasi KUD / Koperasi Pedesaan
- 518.2.3.2 Klasifikasi Koperasi Perkotaan
- 518.2.3.3 Klasifikasi Koperasi Sekunder
- 518.2.3.4 Klasifikasi KUD Mandiri
- 518.2.4 Administrasi Ketatalaksanaan Koperasi
- 518.2.4.1 Administrasi KUD / Koperasi Pedesaan
- 518.2.4.2 Administrasi Koperasi Perkotaan
- 518.2.4.3 Karyawan / Manager Koperasi
- 518.2.4.4 Sumber Daya Manusia
- 518.2.4.5 Tenaga Kerja Sukarela Terdidik (TKST)
- 518.2.4.6 Penyaluran Alat Sekolah
- 518.2.4.7 Bantuan Pemda Kepada Koperasi / KUD
- 518.2.5 Akuntansi
- 518.2.5.1 Akuntansi KUD / Koperasi Pedesaan
- 518.2.5.2 Akuntansi Koperasi Perkotaan
- 518.2.5.3 Akuntansi Koperasi Sekunder
- 518.2.6 Pengawasan Koperasi
- 518.2.6.1 Pengawasan Koperasi Primer
- 518.2.6.2 Pengawasan Koperasi Sekunder
- 518.2.6.3 Koperasi Jasa Audit
- 518.2.6.4 Kerjasama Kantor Akuntan
- 518.2.7 Penyuluhan Koperasi
- 518.2.7.1 Pembinaan Kader Koperasi
- 518.2.7.2 Masyarakat Umum
- 518.2.7.3 Forum Komunikasi
- 518.2.7.4 Kelompok Tani
- 518.2.7.5 Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PKKL)
- 518.2.7.6 Penilaian Tingkat Nasional

- 518.3 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
- 518.3.1 Pembinaan Usaha
  - 518.3.1.1 Pembinaan Usaha Mikro
  - 518.3.1.2 Pembinaan Usaha Kecil
  - 518.3.1.3 Pembinaan Usaha Menengah
- 518.3.2 Kredit Usaha
  - 518.3.2.1 Kredit Usaha Mikro
  - 518.3.2.2 Kredit Usaha Kecil
  - 518.3.2.3 Kredit Usaha Menengah
- 518.3.3 Pengawasan Usaha
  - 518.3.3.1 Pengawasan Usaha Mikro
  - 518.3.3.2 Pengawasan Usaha Kecil
  - 518.3.3.3 Pengawaasan Usaha Menengah
- 519 -

## **520 PERTANIAN DAN TANAMAN PANGAN**

- 521 Tanaman Pangan
  - 521.1 Rencana dan Program
    - 521.1.1 Bina Ketahanan Pangan
    - 521.1.2 Pelaporan dan Evaluasi Pertanian
  - 521.2 Peningkatan Produksi Tanaman Strategi Pangan
    - 521.2.1 Padi
      - 521.2.1.1 Sawah
      - 521.2.1.2 Gogo
      - 521.2.1.3 Huma
    - 521.2.2 Palawija
      - 521.2.2.1 Kacang
      - 521.2.2.2 Jagung
      - 521.2.2.3 Ketela Pohon
      - 521.2.2.4 Ubi-ubian
      - 521.2.2.5 Kedelai
    - 521.2.3 Holtikultura
    - 521.2.4 Sayuran
    - 521.2.5 Buah-buahan
    - 521.2.6 Tanaman Hias
    - 521.2.7 Perlebahan
    - 521.2.8 Panen Gagal (Puso)
  - 521.3 Sarana Usaha Pertanian
    - 521.3.1 Peralatan Meliputi traktor dan sebagainya
    - 521.3.2 Pembenihan dan pembibitan
    - 521.3.3 Pupuk
    - 521.3.4 Irigasi Pertanian
    - 521.3.5 Rehabilitasi Lahan Pertanian
  - 521.4 Perlindungan Tanaman
    - 521.4.1 Penyakit
      - 521.4.1.1 Penyakit Daun
      - 521.4.1.2 Penyakit Batang
    - 521.4.2 Hama
      - 521.4.2.1 Hama serangga, diklarifikasikan : wereng, walang sangit, tungro
      - 521.4.2.2 Hama Tikus, dan sejenisnya
    - 521.4.3 Pemberantasan
    - 521.4.4 Pestisida

- 521.4.5            Agensia Pengendalian Hayati
- 521.5            Tanah Pertanian Pangan
- 521.5.1            Persawahan
- 521.5.2            Perladangan
- 521.5.3            Kebun / Pembibitan
- 521.6            Pengusaha, Petani
- 521.7            Lahan Kritis
- 521.8            Pemasaran
- 521.8.1            Pemasaran dan Promosi tanaman pangan
- 521.8.2            Pemasaran hortikultura
- 521.9            Pengembangan Sumber Daya Pertanian
- 521.9.1            Sekolah Lapangan Pembenihan Hama Tanaman
- 521.9.2            Balai Benih Pertanian
- 522            Kehutanan
- 522.1            Perencanaan Hutan
- 522.1.1            Survey
- 522.1.1.1            Survey PPA
- 522.1.1.2            Survey Areal
- 522.1.1.3            Survey Pembinaan Hutan
- 522.1.1.4            Survey Potensi Hutan
- 522.1.2            Pendataan / Inventarisasi Areal Hutan
- 522.1.2.1            Data Areal tata Guna Hutan
- 522.1.2.2            Data Areal Konservasi
- 522.2            Tata Guna Hutan
- 522.2.1            Tata Ruang Kawasan
- 522.2.1.1            Pengurusan Kawasan hutan
- 522.2.1.2            Penafsiran Hutan
- 522.2.1.3            Mutasi Hutan
- 522.2.2            Tata Hutan
- 522.2.2.1            Tata Hutan Sementara
- 522.2.2.2            Tata Hutan Tetap
- 522.2.2.3            Pembukaan Hutan
- 522.2.3            Pengukuran dan Pemetaan
- 522.2.3.1            Pengukuran
- 522.2.3.2            Perpetaan
- 522.3            Pengusahaan Hutan
- 522.3.1            Data Areal HPH
- 522.3.1.1            Areal HPH
- 522.3.1.2            SK HPH
- 522.3.1.3            Kerjasama
- 522.3.1.4            Pembatalan / Penolakan
- 522.3.2            Modal dan Peralatan
- 522.3.2.1            Inventarisasi Logging
- 522.3.2.2            Inventarisasi Industri
- 522.3.2.3            Peralatan
- 522.3.2.4            Tenaga Kerja Pengusahaan Hutan
- 522.3.2.5            Pemegang Saham
- 522.3.2.6            Neraca Perusahaan
- 522.3.3            Rencana Kerja
- 522.3.3.1            KHPH
- 522.3.3.2            RKPH
- 522.3.3.3            Rencana karya lima tahun RKPH
- 522.3.4            Perpanjangan HPH

- 522.3.5           Produksi
  - 522.3.5.1        Target Produksi
  - 522.3.5.2        Produksi Kayu
  - 522.3.5.3        Produksi Non-Kayu
- 522.3.6           Industri
  - 522.3.6.1        Industri Kayu HPH
  - 522.3.6.2        Industri Kayu Non-HPH
  - 522.3.6.3        Industri Non Kayu
- 522.3.7           Pembinaan HPH
  - 522.3.7.1        Pelanggaran dan Sanksi pengrusakan hutan
  - 522.3.7.2        Pengrusakan hutan
  - 522.3.7.3        Pembalakan liar / illegal logging
  - 522.3.7.4        Memotarium
- 522.3.8           Pembangunan Hutan Tanaman Industri
  - 522.3.8.1        Hutan Tanaman Industri Pulp
  - 522.3.8.2        Hutan Tanaman Industri
- 522.3.9           Iuran Hutan
- 522.4            Sarana Usaha
  - 522.4.1           Standarisasi
    - 522.4.1.1        Kayu
    - 522.4.1.2        Non Kayu
  - 522.4.2           Pengujian Hasil Hutan
    - 522.4.2.1        Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan
  - 522.4.3           Pengembangan
    - 522.4.3.1        Pengembangan Perusahaan
    - 522.4.3.2        Pengembangan Pemasaran
  - 522.4.4           Pemasaran Hasil Hutan
  - 522.4.5           Angkutan Hasil Hutan
    - 522.4.5.1        Sarana dan Prasarana
    - 522.4.5.2        Pembinaan dan Peningkatan Daya Hutan
  - 522.4.6           Tata Usaha Hasil Hutan
- 522.5            Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam
  - 522.5.1           Konservasi Jenis
    - 522.5.1.1        Satwa yang dilindungi
    - 522.5.1.2        Satwa yang tidak dilindungi
    - 522.5.1.3        Lembaga konservasi satwa
    - 522.5.1.4        Lembaga konservasi tumbuhan
  - 522.5.2           Kawasan Konservasi
    - 522.5.2.1        Cagar Alam (Termasuk Laut)
    - 522.5.2.2        Suaka Margasatwa
    - 522.5.2.3        Taman Wisata (Termasuk Laut)
    - 522.5.2.4        Taman Nasional
    - 522.5.2.5        Taman Hutan Raya
    - 522.5.2.6        Taman Baru
    - 522.5.2.7        Hutan Lindung
    - 522.5.2.8        Hutan Kota
    - 522.5.2.9        Hutan Mangrove
    - 522.5.2.10       Huta Rakyat
  - 522.5.3           Pengkajian Lingkungan
    - 522.5.3.1        Amdal UKL, UPL di dalam kawasan hutan
    - 522.5.3.2        Amdal UKL, UPL di luar kawasan hutan
- 522.5.4           Bina Cinta Alam
  - 522.5.4.1        Kelompok Pecinta Alam

- 522.5.4.2 Kader konservasi Sumber Daya Alam
- 522.5.4.3 Penyuluh Konservasi Sumber Daya Alam
- 522.5.4.4 LSM Lingkungan
- 522.5.5 Pengamanan Hutan
  - 522.5.5.1 Jaga Wana (Polisi Hutan)
  - 522.5.5.2 PPNS
  - 522.5.5.3 Gangguan Keamanan Hutan
  - 522.5.5.4 Bencana Alam
  - 522.5.5.5 Kebakaran Hutan
  - 522.5.5.6 Sengketa Hutan
  - 522.5.5.7 Hama dan Penyakit
  - 522.5.5.8 Pestisida dan Pupuk Tanaman Hutan
  - 522.5.5.9 Alat dan Mesin Kehutanan
- 522.6 Reboisasi dan Rehabilitasi Hutan
  - 522.6.1 Pembenihan
    - 522.6.1.1 Tegakan Benih
    - 522.6.1.2 Pengadaan Benih
    - 522.6.1.3 Pengujian dan Penyimpanan Benih
    - 522.6.1.4 Lalu Lintas Angkutan Benih
    - 522.6.1.5 Pembibitan
    - 522.6.1.6 Pengada dan Pengedar Bibit Bersertifikat
    - 522.6.1.7 Pengada dan Pengedar Bibit Tidak Bersertifikat
  - 522.6.2 Tanaman Reboisasi
    - 522.6.2.1 Lahan Kritis
    - 522.6.2.2 Reboisasi (Hutan Negara) Lahan HPH
    - 522.6.2.3 Rehabilitasi Tanah Hutan
    - 522.6.2.4 Konservasi Tanah dan Air
    - 522.6.2.5 Pengendalian Perladangan
    - 522.6.2.6 Penghijauan (Hutan Rakyat)
    - 522.6.2.7 Aneka Usaha Kehutanan
  - 522.6.3 Perhutanan Sosial
    - 522.6.3.1 Sutera Hutan
    - 522.6.3.2 Minyak Kayu Putih
    - 522.6.3.3 Perlebahan
- 522.7 Hutan Produksi
  - 522.7.1 Hutan Produksi Terbatas
  - 522.7.2 Hutan Produksi yang Dapat di Konservasi
- 522.8 Kawasan Lindung
- 523 Perikanan dan Kelautan
  - 523.1 Rencana, Program, Statistik, Prospek dan Pelaporan Bidang Perikanan dan Kelautan
    - 523.1.1 Penyuluhan
    - 523.1.2 Teknologi dan Pengembangan (Budidaya ikan, tambak)
  - 523.2 Produksi Perikanan
    - 523.2.1 Pelelangan
    - 523.2.2 Standarisasi Mutu Hasil Perikanan
  - 523.3 Usaha Perikanan
    - 523.3.1 Pembibitan
    - 523.3.2 Daerah penangkapan
    - 523.3.3 Perizinan Pembudidayaan Ikan
  - 523.4 Pemasaran
    - 523.4.1 Eksport Komoditas Perikanan
    - 523.4.2 Promosi Komoditas Unggulan

- 523.5 Sarana perikanan
  - 523.5.1 Peralatan
  - 523.5.2 Kapal
  - 523.5.3 Pelabuhan
- 523.6 Pengendalian Hama dan Penyakit
- 523.7 Pengusaha, Nelayan
  - 523.7.1 Kapal / Motor Boat
  - 523.7.2 Jaring
  - 523.7.3 Cold Storage
  - 523.7.4 Tempat Es
  - 523.7.5 Bantuan Nelayan
  - 523.7.6 Tempat Pelelangan Ikan
  - 523.7.7 Pembinaan / Penyuluhan Nelayan
- 523.8 Konservasi dan Suaka Laut
- 524 Peternakan dan Kesehatan Hewan
  - 524.1 Produksi
    - 524.1.1 Susu Ternak Rakyat
    - 524.1.2 Telor
    - 524.1.3 Daging
  - 524.2 Sarana Usaha Peternakan
    - 524.2.1 Pembibitan
    - 524.2.2 Obat Hewan
    - 524.2.3 Alsinak
    - 524.2.4 Pakan
  - 524.3 Kesehatan Hewan
    - 524.3.1 Penyakit Hewan
    - 524.3.2 Pos Kesehatan Hewan
    - 524.3.3 Pemeriksaan Spesimen
    - 524.3.4 Karantina
  - 524.4 Pelayanan Usaha dan Pemasaran
    - 524.4.1 Promosi Produksi Peternakan
    - 524.4.2 Pemasaran Peternakan
      - 524.4.2.1 Pemasaran produksi peternakan
    - 524.4.3 Ijin Usaha Peternakan
  - 524.5 Pengawasan dan Standarisasi
    - 524.5.1 Rumah Potong Hewan
    - 524.5.2 Laboratorium
    - 524.5.3 Standarisasi Bibit Ternak
  - 524.6 Pengembangan Peternakan
    - 524.6.1 Inseminasi buatan
    - 524.6.2 Pembibitan
    - 524.6.3 Kawasan Peternakan
    - 524.6.4 Penyebaran Ternak
  - 524.7 Data dan Informasi
    - 524.7.1 Data Peternakan
    - 524.7.2 Informasi Peternakan
  - 524.8 Organisasi Peternakan
    - 524.8.1 Asosiasi Peternakan
    - 524.8.2 Kelompok Tani Ternak
- 525 Perkebunan
  - 525.1 Rencana dan Program
  - 525.2 Produksi
    - 525.2.1 Karet

525.2.2	Teh
525.2.3	Tembakau
525.2.4	Tebu
525.2.5	Cengkeh
525.2.6	Kelapa / Kopra / Kelapa Sawit
525.2.7	Kopi
525.2.8	Aneka Tanaman
525.3	Usaha Perkebunan
525.3.1	Pembibitan
525.4	Perlindungan Tanaman
525.4.1	Hama
525.4.2	Pestisida
525.4.3	Pupuk
525.5	Alat dan Mesin Perkebunan
525.6	Pengolahan Lahan
525.6.1	Terasering
526	Ketahanan Pangan
526.1	Program Bimbingan Masal
526.2	Pengembangan Sarana Sumber Daya
526.2.1	Pembinaan Teknologi
526.2.2	Sarana Produksi dan Permodalan
526.2.3	Kelembagaan
526.3	Agrobisnis
526.3.1	Mutu Hasil
526.3.2	Pengelolaan Hasil Pangan
526.3.3	Pemasaran Hasil
526.3.4	Kemitraan
526.4	Distribusi Pangan
526.4.1	Sistem dan Pola Distribusi
526.4.2	Sarana dan Prasarana Distribusi
526.4.3	Pengadaan dan Cadangan Pangan
526.5	Kewaspadaan dan Keanekaragaman Pangan
526.5.1	Rawan Pangan, Keamanan, dan Mutu Pangan
526.5.2	Pola Konsumsi Pangan Masyarakat
526.5.3	Sistem Informasi Pangan
527	Penyuluhan
527.1	Sumber Daya Manusia
527.1.1	Penyuluh
527.1.2	Pelaku Utama Pelaku Usaha
527.1.3	Stake Holder
527.2	Kelembagaan
527.2.1	Struktural
527.2.2	Non Struktural
527.2.3	Pelaku Utama Pelaku Usaha
527.2.4	Lembaga Profesi
527.3	Penyelenggaraan Penyuluhan
527.3.1	Program / Metode
527.3.2	Promosi / Pameran / Kampanye
527.3.3	Penghargaan / Lomba
527.3.4	Materi
528	-
529	-

**530 PERINDUSTRIAN**

- 530.1 Undang – Undang Gangguan
- 531 Industri Logam
- 532 Industri Mesin / Elektronik
- 533 Industri Kimia / Farmasi
- 534 Industri Tekstil
- 535 Industri Makanan / Minuman
- 536 Aneka Industri / Perusahaan
- 536.1 Home Industri / Aneka Kerajinan
- 537 Industri kayu / Meubel
- 538 Usaha Negara
- 538.1 Perjan
- 538.2 Perum
- 538.3 Persero
- 539 Badan Usaha Milik Daerah
- 539.1 Pembentukan
- 539.2 Penggabungan
- 539.3 Pembubaran
- 539.4 Perusahaan Daerah (Perusda, PDAM)
- 539.4.1 Program Kerja dan Anggaran
- 539.4.2 Penyertaan Modal
- 539.4.3 Urusan Kepegawaian
- 539.4.4 Pembagian Laba / Deviden
- 539.4.5 Laporan Bulanan
- 539.4.6 Laporan Tahunan

**540 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

- 541 Minyak dan Gas Bumi
- 541.1 Pengusahaan
- 541.1.1 Perijinan
- 541.1.2 Kontrak Kerja
- 541.1.3 Eksplorasi
- 541.1.4 Pengolahan
- 541.2 Penyaluran
- 541.3 Tangki, Pompa, Tanker
- 542 Energi
- 542.1 Energi Alternatif
- 542.1.1 Gas Rawa
- 542.1.2 Bahan Bakar Nabati (Biofuel)
- 542.1.3 Biogas
- 542.1.4 Energi Terbarukan
- 542.1.5 Perijinan
- 542.1.6 Rekomendasi
- 542.1.7 Pembinaan dan Pengawasan
- 542.2 Konservasi Energi
- 542.3 Pemetaan Energi
- 542.4 Rencana Umum Perencanaan Energi Daerah ( RUPED)
- 543 Logam Mulia meliputi Intan, Emas, Perak
- 544 Logam
- 544.1 Timah
- 544.2 Alumunium, Boxit
- 544.3 Besi, termasuk Besi Tua
- 544.4 Tembaga
- 545 Aneka Tambang / Bahan Galian



- 545.1 Air Permukaan
- 545.2 Air Bawah Tanah
  - 545.2.1 Perijinan
    - 545.2.1.1 Sumur Artetis
    - 545.2.1.2 Sumur Bor
    - 545.2.1.3 Sumur Gali / Pasak
    - 545.2.1.4 Mata Air
    - 545.2.1.5 Pengusaha, Pengebor (APPATINDO)
  - 545.2.2 Sumur Pantau
  - 545.2.3 Pemasangan / Penyegehan Water Meter
  - 545.2.4 Produksi / Nilai Perolehan Air (NPA)
  - 545.2.5 Pengawasan, Pengendalian, Pembinaan
- 546 Geologi
  - 546.1 Vulkanologi
    - 546.1.1 Pengawasan Gunung Berapi
    - 546.1.2 Panas Bumi
  - 546.2 Sumber Daya Mineral
  - 546.3 Hidrogeologi
  - 546.4 Gerakan Tanah (Longsoran, Ambiesan)
  - 546.5 Pengawasan, Pengendalian
- 547 Hidrologi
- 548 Kesamuderaan
- 549 Penghematan Energi
- 550 PERHUBUNGAN**
- 551 Perhubungan Darat
  - 551.1 Lalu Lintas Jalan Raya, Sungai, Danau
    - 551.1.1 Kemananan Lalu Lintas, Rambu-Rambu
    - 551.1.2 Uji Kelayakan Kendaraan Bermotor (Keur)
    - 551.1.3 Kecelakaan Lalu Lintas
  - 551.2 Angkutan Jalan Raya
    - 551.2.1 Perizinan (Trayek, Usaha Angkutan)
    - 551.2.2 Terminal
    - 551.2.3 Alat Angkutan
    - 551.2.4 Jembatan Timbang / Lebih Muatan
    - 551.2.5 Uji Mutu (Kendaraan Baru, Brankas)
  - 551.3 Angkutan Sungai
    - 551.3.1 Keselamatan, Rambu-Rambu
    - 551.3.2 Lalu Lintas
    - 551.3.3 Alur dan Kolam Pelabuhan
    - 551.3.4 Trayek
    - 551.3.5 Sarana / Kapal
    - 551.3.6 Pelabuhan
    - 551.3.7 Terminal
    - 551.3.8 Kecelakaan
    - 551.3.9 Perizinan
  - 551.4 Angkutan Danau
    - 551.4.1 Keselamatan, Rambu-Rambu
    - 551.4.2 Lalu Lintas
    - 551.4.3 Alur dan Kolam Pelabuhan
    - 551.4.4 Trayek
    - 551.4.5 Sarana / Kapal
    - 551.4.6 Pelabuhan
    - 551.4.7 Terminal

- 551.4.8 Kecelakaan
- 551.4.9 Perizinan
- 552 Perhubungan Laut
  - 552.1 Lalu Lintas Angkutan Laut
    - 552.1.1 Pelayaran Dalam Negeri
    - 552.1.2 Pelayaran Luar Negeri
    - 552.1.3 Pelayaran Haji
    - 552.1.4 Pelayaran Charter / Wisata Turis
    - 552.1.5 Pelayaran Khusus
    - 552.1.6 Keamanan Lalu Lintas, Rambu-Rambu
  - 552.2 Perkapalan – Alat Angkutan
    - 552.2.1 Kapal Penumpang
    - 552.2.2 Kapal Barang
    - 552.2.3 Kapal Perang / Patroli / Negara
    - 552.2.4 Kapal Tanker
    - 552.2.5 Ponton / Tongkang
    - 552.2.6 Kapal Layar
    - 552.2.7 Kapal Layar Motor
    - 552.2.8 Kapal Kontainer
  - 552.3 Pelabuhan
    - 552.3.1 Tanah / Lokasi
    - 552.3.2 Alur Layar
    - 552.3.3 Dermaga
    - 552.3.4 Terminal Penumpang
    - 552.3.5 Terminal Kontainer
    - 552.3.6 Bangunan / Gedung / Gudang
    - 552.3.7 Perlengkapan Tambat Labuh
    - 552.3.8 Lapangan Penumpukan
    - 552.3.9 Pelabuhan Khusus / Dermaga Khusus
  - 552.4 Pengerukan / Perawatan
    - 552.4.1 Alur Pelayaran
    - 552.4.2 Kolam Pelabuhan
    - 552.4.3 Reklamasi Pantai
    - 552.4.4 Dumping Area
    - 552.4.5 Pekerjaan Bawah Air (Salvage)
  - 552.5 Penjagaan Pantai
    - 552.5.1 Patroli Bandar
    - 552.5.2 Patroli Perairan
    - 552.5.3 Penjagaan Pantai dan Penanggulangan Keselamatan di Laut (GAMAT)
  - 552.6 Angkutan barang
    - 552.6.1 Pos
    - 552.6.2 Minyak
    - 552.6.3 Log
    - 552.6.4 Ternak
    - 552.6.5 Sembilan Bahan Pokok
    - 552.6.6 Peti Kemas / EMKL
    - 552.6.7 Muatan Umum
    - 552.6.8 Barang Dalam Negeri, Barang Luar Negeri
    - 552.6.9 Bongkar Muat
  - 552.7 Keselamatan
    - 552.7.1 Rambu-rambu, Mercusuar
    - 552.7.2 Kelaikan kapal / Pembuatan Kapal

- 552.7.3 Fasilitas Keselamatan / Keamanan
- 552.7.4 Telekomunikasi Pelayaran
- 552.7.5 Sertifikasi Kesempurnaan Kapal
- 552.7.6 Sertifikasi Awak Kapal
- 552.8 Kecelakaan Gangguan
  - 552.8.1 Kecelakaan Penumpang / Kapal
  - 552.8.2 Kecelakaan Barang
  - 552.8.3 Gangguan Sarana / Prasarana
  - 552.8.4 Pembajakan / Penyelundupan
  - 552.8.5 Pencermaran
- 552.9 Perinjinan
  - 552.9.1 Ijin Berlayar
  - 552.9.2 Ijin Pekerjaan Bawah Air
  - 552.9.3 Ijin Pembuatan dan Perubahan Bentuk Kapal
  - 552.9.4 Ijin Pembukaan Kantor Cabang
  - 552.9.5 Ijin Usaha Angkutan Laut
  - 552.9.6 Ijin Usaha Penunjang Angkutan Laut
  - 552.9.7 Ijin Pelayanan Jasa Pelabuhan
  - 552.9.8 Ijin Pembangunan Pelabuhan Khusus
  - 552.9.9 Ijin Pembangunan Dermaga Khusus
- 553 Perhubungan Udara
  - 553.1 Lalu Lintas Angkutan Udara
    - 553.1.1 Penerbangan Domestik
    - 553.1.2 Penerbangan Luar Negeri
    - 553.1.3 Penerbangan Haji
    - 553.1.4 Penerbangan Charter / Non Reguler
    - 553.1.5 Penerbangn Khusus / Jembatan Udara
  - 553.2 Pelabuhan Udara
    - 553.2.1 Tanah / Lokasi
    - 553.2.2 Landasan
    - 553.2.3 Apron
    - 553.2.4 Terminal Penumpang
    - 553.2.5 Terminal Cargo
    - 553.2.6 Bangunan / Gedung
    - 553.2.7 Perlengkapan
    - 553.2.8 Parkir Kendaraan
  - 553.3 Alat Angkutan
    - 553.3.1 Pesawat Udara
    - 553.3.2 Helikopter
  - 553.4 Angkutan Barang
    - 553.4.1 Pos
    - 553.4.2 Muatan Dalam Negeri
    - 553.4.3 Muatan Luar Negeri
    - 553.4.4 E M P U
  - 553.5 Sertifikasi Kelaikan
    - 553.5.1 Kelaikan Pesawat Udara
    - 553.5.2 Kelaikan Peralatan Penunjang
    - 553.5.3 Kelaikan Personil / Awak kapal
  - 553.6 Keselamatan
    - 553.6.1 Rambu – Rambu
    - 553.6.2 Perakitan / Kalibrasi
    - 553.6.3 Fasilitas Keselamatan
    - 553.6.4 Telekomunikasi Penerbangan

- 553.7 Kecelakaan / Gangguan
  - 553.7.1 Kecelakaan Penumpang
  - 553.7.2 Kecelakaan Barang
  - 553.7.3 Gangguan Sarana / Prasarana
  - 553.7.4 Pembajakan
  - 553.7.5 Pencemaran
- 553.8 Umum
  - 553.8.1 Asuransi
  - 553.8.2 Asosiasi
  - 553.8.3 SATPAM
  - 553.8.4 Rally Udara / Lomba
- 553.9 Perizinan
  - 553.9.1 Izin Terbang / Flight Approval
  - 553.9.2 Usaha Penunjang Kegiatan Penerbangan / EMPU
  - 553.9.3 Pembukaan Kantor Cabang
  - 553.9.4 Rekomendasi Ketinggian Bangunan
  - 553.9.5 Pembangunan Bandar Udara Khusus
- 554 POS
  - 554.1 Pembinaan
    - 554.1.1 Kebutuhan Fasilitas
    - 554.1.2 Rehabilitasi / Perawatan
    - 554.1.3 Bina Usaha / pengawasan / Penertiban
    - 554.1.4 Standarisasi Perangkat
    - 554.1.5 Tanah / Bangunan
    - 554.1.6 Filateli
    - 554.1.7 Asosiasi
    - 554.1.8 Laporan dan Evaluasi
  - 554.2 Pelayanan
    - 554.2.1 Jasa Pos
    - 554.2.2 Jasa Titipan
    - 554.2.3 Jasa Giro
    - 554.2.4 Benda Pos / Perangko
    - 554.2.5 Sampul Peringatan
    - 554.2.6 Jasa Pos Elektronik
  - 554.3 Perijinan
    - 554.3.1 Rekomendasi Jasa Pos / Titipan
    - 554.3.2 Pembukaan Agen / Cabang
  - 554.4 Gangguan Sarana dan Prasarana
    - 554.4.1 Kecelakaan
    - 554.4.2 Sabotase
    - 554.4.3 Penyelundupan
- 555 Telekomunikasi
  - 555.1 Telepon
    - 555.1.1 Tetap
    - 555.1.2 Bergerak
    - 555.1.3 Wartel
    - 555.1.4 IKR / G
    - 555.1.5 Internet / USO
  - 555.2 Telegram, Telex / SBB
  - 555.3 Satelit
  - 555.4 Stasiun Bumi
  - 555.5 Faximile
  - 555.6 Frekwensi dan Informasi

555.6.1	Amatir Radio
555.6.2	KRAP
555.6.3	Radio Siaran Lokal
555.6.4	Televisi Siaran Lokal
555.6.5	Radio Konsensi Lokal
555.6.6	Radio Base Station
555.6.7	ISPU ( Internet service Provider )
555.6.8	Warnet
555.7	Pembinaan / Penertiban Pengawasan
555.7.1	Wartel
555.7.2	Frekwensi dan Informatika
555.8	Standarisasi Perangkat Telekomunikasi
555.9	Perizinan
555.9.1	Amatir Radio
555.9.2	K R A P
555.9.3	Radio Siaran Lokal
555.9.4	Televisi Siaran Lokal
555.9.5	Radio Konsesi Lokal
555.9.6	Radio Base Station
556	Pariwisata dan Rekreasi
556.1	Usaha Pariwisata
556.1.1	Usaha Jasa Pariwisata
556.1.1.1	Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata
556.1.2	Izin Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata
556.1.3	Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata
556.1.4	Usaha Sarana Pariwisata
556.1.4.1	Ijin Pariwisata
556.1.4.2	Ijin Usaha Pariwisata
556.1.4.3	Ijin Usaha Jasa Pariwisata
556.1.4.4	Ijin Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata
556.1.4.5	Ijin Usaha Sarana
556.1.5	Wisatawan
556.1.5.1	Wisatawan Nusantara
556.1.5.2	Wisatawan Mancanegara
556.1.6	Promosi dan Informasi Pariwisata
556.1.6.1	Dalam Negeri
556.1.6.2	Luar Negeri
556.2	Perhotelan
556.2.1	Status Hotel
556.2.2	Kelas Hotel
556.2.3	Tarif
556.3	Travel Service
556.3.1	Pramu Wisata
556.3.2	Biro Perjalanan / Angkutan Wisata
556.3.3	Souvenir
556.3.4	Kemudahan Wisata (Visa, Bea Cukai, Karantina)
556.4	Tempat Rekreasi
556.4.1	Obyek dan Daya Tarik Wisata
556.4.1.1	Wisata Alam (Laut, Gunung, Air Terjun, dll)
556.4.1.2	Taman Hiburan
556.4.2	Rehabilitasi / Perawatan
556.4.3	Pengembangan Fasilitas
556.4.4	Tanah / Bangunan

- 556.4.5 Bina Usaha
- 556.4.6 Institusi
  - 556.4.6.1 Asosiasi
  - 556.4.6.2 Lembaga Kepariwisataaan
- 557 Meteorologi
  - 557.1 Curah Hujan
  - 557.2 Hujan Buatan
  - 557.3 Peneropongan Bintang
- 558 -
- 559 -
- 560 TENAGA KERJA**
  - 560.1 Data Permintaan TKI / TKW Dari Luar Negeri
    - 560.1.1 Data Persediaan TKI / TKW Dari Daerah
  - 560.2 Job Order TKI Ke Luar Negeri oleh PJTKI
  - 560.3 Rekrutmen Calon TKI / TKW
  - 560.4 Seleksi Naker Ke Luar Negeri
    - 560.4.1 Pendaftaran dan Seleksi Calon TKI / TKW
    - 560.4.2 Berkas Persyaratan Calon TKI / TKW
    - 560.4.3 Pemeriksaan dan Hasil cek kesehatan calon TKI / TKW
  - 560.5 Persyaratan Naker TKI / TKW
    - 560.5.1 Permohonan Rekomendasi Passport
    - 560.5.2 Perjanjian Kerja TKI / TKW
    - 560.5.3 Kartu Identitas Tenaga Kerja Indonesia (KITKI)
    - 560.5.4 Permohonan Fiskal Ke Luar Negeri
    - 560.5.5 Pelatihan TKI / TKW
  - 560.6 Pemberangkatan Naker
    - 560.6.1 Pemberangkatan ke Luar Negeri
    - 560.6.2 Pembekalan Akhir pemberangkatan TKI / TKW ke Luar Negeri
    - 560.6.3 Berita Acara Serah Terima TKI / TKW
  - 560.7 Pemulangan Naker
    - 560.7.1 Kepulangan TKI / TKW Karena Kontraknya Habis
    - 560.7.2 Pemulangan TKI / TKW Ilegal
    - 560.7.3 TKI / TKW Terkena kasus Pidana
  - 561 Pengupahan
    - 561.1 Kegiatan Dan Hasil Sidang Dewan Penelitian Pengupahan Daerah / Nasional
    - 561.2 Permohonan Penanggulangan Pelaksanaan Pembayaran Upah Minimum Kabupaten / Kota dan Provinsi
    - 561.3 Kebutuhan Fisik Minimum
    - 561.4 Perhitungan Upah Kerja (Termasuk di dalamnya upah lembur)
    - 561.5 Laporan Data Remittance
    - 561.6 Pembayaran Gaji / Upah TKI / TKW
  - 562 Penempatan Kerja
    - 562.1 Penempatan Naker Mandiri Terdidik (TKMT)
      - 562.1.1 Penempatan Naker Mandiri Professional (TKMP)
      - 562.1.2 Penempatan naker Non Terdidik dan Non Professional
      - 562.1.3 Pengembangan Kesempatan Berusaha / Perluasan Kerja
    - 562.2 Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)
    - 562.3 Lembaga Penyalur Naker
      - 562.3.1 Ijin Pendirian Lembaga Penyalur Naker Antar Kerja Lokal / Daerah dan Antar Kerja Negara (AKAN)
      - 562.3.2 Data Evaluasi Kinerja Penyalur Jasa Tenaga Kerja (PJTKI / BKS / BKK)

- 562.3.3 Pencabutan Ijin Penyalur Jasa Tenaga Kerja (PJTKI, BKK, BKS)
- 563 Pendidikan dan Pelatihan
  - 563.1 Pendidikan Pekerja
    - 563.1.1 Pendidikan dan Latihan Kerja
    - 563.1.2 Diklat di Dalam Negeri (PKL, Prakerin, OJT)
    - 563.1.3 Diklat di Luar Negeri (Pemagangan)
  - 563.2 Sarana dan Prasarana Latihan Kerja
    - 563.2.1 Tempat Latihan (BLK)
    - 563.2.2 Instruktur / Pelatih
    - 563.2.3 Modul / Silabus dan Bahan Praktek
    - 563.2.4 Kurikulum Pelatihan Tenaga Kerja
    - 563.2.5 Sertifikat
  - 563.3 Kerjasama Pelatihan Tenaga Kerja
- 564 Tenaga Sukarela
- 565 Perselisihan dan Perkara Hukum Naker
  - 565.1.1 Pengaduan Perkara Perburuhan / NAKER
  - 565.1.2 Pemeriksaan Perkara Perburuhan / NAKER
  - 565.1.3 Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Perburuhan / NAKER
  - 565.1.4 Sidang Perkara Perselisihan Perburuhan / NAKER
  - 565.1.5 Hasil Putusan Sidang Perkara Perselisihan Perburuhan (NAKER)
  - 565.1.6 Peninjauan Kembali Hasil Putusan Sidang KP2K (P4D / P4P)
  - 565.1.7 Permintaan Eksekusi Terhadap Hasil Keputusan KP2K (P4D / P4P)
  - 565.1.8 Daftar Usulan, Susunan dan Penetapan Anggota KP2K (P4D / P4P)
  - 565.2 Pemogokan / Unjuk Rasa Tenaga Kerja
- 566 Keselamatan dan Keamanan Kerja
  - 566.1 Instalasi Proteksi Kebakaran
  - 566.2 Pemakaian Alat Keselamatan kerja
  - 566.3 Keterangan Kelayakan atau Pelindung Diri (APD) dalam Bekerja
  - 566.4 Pengangkatan dan Pembinaan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
  - 566.5 Pelatihan / Pembinaan Hyperkes dan Keselamatan Kerja
  - 566.6 Pengujian dan Hasil Pemeriksaan Hyperkes
  - 566.7 Gangguan Lingkungan Tempat Usaha
  - 566.8 Perlengkapan Sarana Kerja
    - 566.8.1 Pemasangan dan Pemakaian Lift (Pesawat Angkat / Angkut)
    - 566.8.2 Pemasangan dan Pemakaian Pesawat Uap (Ketel Uap)
    - 566.8.3 Pemasangan dan Pemakaian Motor Diesel
    - 566.8.4 Pemasangan dan Pemakaian Tanki Tak Bertekanan
    - 566.8.5 Pemasangan dan Pemakaian Alat Pemadam Kebakaran
  - 566.9 Ijin Tenaga kerja Wanita Masuk Malam Hari (Shift Malam)
- 567 Pemutusan Hubungan Kerja
  - 567.1 Pengaduan PHK Sepihak
  - 567.2 PHK Masal
  - 567.3 Bantuan Hukum Bagi Pekerja yang di PHK
  - 567.4 Ijin Melakukan PHK
  - 567.5 Penghitungan Masa Kerja Bagi Pekerja yang di PHK
  - 567.6 Pemberian Uang Tunggu Bagi Pekerja yang di PHK
  - 567.7 Pemberian Uang Pesangon Bagi Pekerja yang di PHK
- 568 Kesejahteraan Buruh
  - 568.1 Bantuan Kredit / Bantuan Modal Kerja Bagi Naker

- 568.1.1 Pemilihan Pekerja Teladan
- 568.2 Perumahan Pekerja
- 568.3 Keikutsertaan Pekerja Dalam Program Jamsostek
- 568.4 Koperasi Pekerja
- 568.5 Sarana Transportasi Pekerja
- 568.6 Perpustakaan Pekerja
- 568.7 Tempat Ibadah Pekerja
- 568.8 Rekreasi dan Olahraga Pekerja
- 568.9 Pendirian, Pendaftaran, dan Kegiatan Organisasi Pekerja
- 568.9.1 Lembaga Kerjasama Bipatrid
- 569 Tenaga Kerja Orang Asing
- 569.1 Rekomendasi Perpanjangan Ijin Kerja Tenaga Asing / IKTA
- 569.2 Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)
- 569.3 Kualifikasi Keahlian Tenaga Kerja Asing
- 569.4 Perjanjian Kerja Dengan Negara Asing
- 569.5 Data Tenaga Kerja Asing
- 569.6 Kecelakaan / Kematian Tenaga Kerja Asing
- 569.7 Pemulangan Tenaga Kerja Asing
- 569.8 Pemberdayaan dan Kontribusi Tenaga Kerja Asing
- 569.9 Tenaga Kerja Asing Ilegal

**570 PENANAMAN MODAL**

- 570.1 Kerjasama Penanaman Modal Antar Provinsi
- 570.2 Kerjasama Penanaman Modal Antar Kabupaten
- 571 Modal Asing
- 572 Modal Patungan (Joint Venture) / Penyertaan Modal
- 573 Pasar Uang dan Modal
- 574 Saham
- 575 -
- 576 -
- 577 -
- 578 -
- 579 -

**580 PERBANKAN MONETER**

- 580.1 Bank Milik Pemerintah
- 580.1.1 Pusat / Provinsi (BRI, BNI, BANK JATENG)
- 580.1.2 Kabupaten / Kota (BPR, BKK, Bank Pasar)
- 580.1.3 Program Kerja dan Anggaran
- 580.1.4 Penyertaan Modal
- 580.1.5 Urusan Kepegawaian
- 580.1.6 Pembagian Laba / Deviden
- 580.1.7 Laporan Berkala
- 580.1.8 Laporan Tahunan
- 580.2 Bank Milik Swasta (BCA, Danamon, dll.)
- 581 Kredit
- 582 Investasi
- 583 Tabungan
- 584 Bank Pembangunan Daerah
- 585 Asuransi
- 585.1 Dana Kecelakaan Lalu Lintas
- 585.2 Polis
- 585.3 Premi
- 585.4 Tertanggung / Pemegang Polis
- 585.5 Uang Pertanggungan



586	Alat pembayaran Check, Giro Wesel, Transfer
587	Fiskal
588	Hutang Negara Obligasi
589	Moneter
<b>590</b>	<b>AGRARIA</b>
591	Tata Guna Tanah
591.1	Pemetaan dan pengukuran
591.2	Perpetaan
591.3	Penyediaan Data, Peta, dan Publikasi
591.4	Fakta Tata Guna Tanah
591.5	Tanah Kritis
592	Landreform
592.1	Redistribusi
592.1.1	Pendaftaran Pemilikan dan Pengurusan Tanah
592.1.2	Penentuan Tanah Obyek Landreform
592.1.3	Pembagian Tanah Obyek Landreform
592.1.4	Sengketa Redistribusi Tanah Obyek Landreform
592.2	Ganti Rugi
592.2.1	Ganti Rugi Tanah Kelebihan
592.2.2	Sengketa Ganti Rugi Tanah Kelebihan
592.2.3	Ganti Rugi Tanah Absentee
592.2.4	Sengketa Ganti Rugi Tanah Absentee
592.2.5	Ganti Rugi Tanah Partikelir
592.2.6	Sengketa Ganti Rugi Tanah Partikelir
592.3	Bagi Hasil
592.3.1	Penetapan Imbangan Bagi Hasil
592.3.2	Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil
592.3.3	Sengketa Perjanjian Bagi Hasil
592.4	Gedai Tanah
592.4.1	Pendaftaran Pelaksanaan Gadai Tanah
592.4.2	Pelaksanaan Gadai Tanah
592.4.3	Sengketa Gadai Tanah
592.5	Bimbingan dan Penyuluhan
592.6	Pengembangan
592.7	Yayasan Dana Landreform
593	Pengurusan hak-hak Tanah
593.1	Penyusunan program dan bimbingan Teknis
593.1.1	Sewa tanah
593.1.1.1	Sewa Tanah Untuk Tanaman Tertentu : Tebu, Tembakau, Roselia, Corchorus
593.2	Hak Milik
593.2.1	Perorangan
593.2.2	Badan hukum
593.3	Hak Pakai
593.3.1	Perorangan
593.3.1.1	Warga Negara Indonesia
593.3.1.2	Warga Negara Asing
593.3.2	Badan Hukum
593.3.2.1	Badan Hukum Indonesia
593.3.2.2	Badan Hukum Asing, Kedaulatan, Konsulat, Kantor Dagang Asing
593.3.3	Tanah Gedung-gedung Negeri
593.4	Guna Usaha

593.4.1	Perkebunan Besar
593.4.2	Perkebunan Rakyat
593.4.3	Peternakan
593.4.4	Perikanan
593.4.5	Kehutanan
593.5	Hak Guna Bangunan
593.5.1	Perorangan
593.5.2	Badan Hukum
593.5.3	P3MB (Panitia Pelaksana Pengusahaan Milik Belanda)
593.5.4	Badan Hukum Asing Belanda – PBK No. 5 / 65
593.5.5	Pemilikan Hak (Per Pres 4 / 1960)
593.6	Hak Pengelolaan
593.6.1	PN Perumnas, Bonded Ware House, Industrial Estate, Real Estate.
593.6.2	Perusahaan Daerah Pembangunan Perumahan
593.7	Sengketa Tanah
593.7.1	Peradilan perkara tanah (lihat juga 183)
593.8	Pencabutan dan Pembebasan Tanah
593.8.1	Pencabutan Hak
593.8.2	Pembebasan Tanah
593.8.3	Ganti Rugi Tanah
594	Pendaftaran Tanah
594.1	Pengukuran / Pemetaan
594.1.1	Fotogrametri
594.1.2	Teristris
594.1.3	Triangulasi
594.1.4	Peralatan
594.2	Dana Pengukuran (Permen Agraria No. 6 / 1960)
594.3	Sertifikat
594.4	Pejabat Pembuat Akte Tanah
594.5	Notaris
595	Transmigrasi
595.1	Tata Guna Tanah
595.2	Landreform
595.3	Pengurusan hak-hak tanah
595.4	Pendaftaran Tanah
596	Pengadaan Tanah
596.1	Tanah Negara
596.2	Tanah Warga
597	-
598	-
599	-
<b>600</b>	<b>PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAKERJAAN</b>
601	Tata bangunan konstruksi, industri konstruksi
602	Jasa Konstruksi
602.1	Daftar Rekanan Mampu
602.2	Tanda Daftar Rekanan
602.3	Kontraktor, Pemborong
602.4	Tender
602.5	Penunjukan
602.5.1	Penunjukan Langsung
603	Arsitektur
604	Bahan Bangunan

- 604.1 Tanah dan Batu
- 604.2 Aspal
- 604.3 Besi dan Logam Lainnya
  - 604.3.1 Besi Beton
  - 604.3.2 Besi Profil
  - 604.3.3 Paku
  - 604.3.4 Alumunium Profil
- 604.4 Bahan – bahan pelindung dan pengawet (cat, tech oil, pengawet kayu)
- 604.5 Semen
- 604.6 Kayu
- 604.7 Bahan Penutup Atap
- 604.8 Alat-alat penggantung dan pengunci
- 604.9 Bahan-bahan bangunan lainnya
- 605 Instalansi
  - 605.1 Instalansi Bangunan
  - 605.2 Instalansi Listrik
  - 605.3 Instalansi Air / Sanitasi
  - 605.4 Instalansi Pengatur Udara
  - 605.5 Instalansi Akustik
  - 605.6 Instalansi Cahaya / Penerangan
  - 605.7 Instalansi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
- 606 Konstruksi Pencegahan
  - 606.1 Konstruksi pencegahan terhadap kebakaran
  - 606.2 Terhadap Gempa
  - 606.3 Terhadap Angin / Udara / Panas
  - 606.4 Terhadap Kegaduhan
  - 606.5 Terhadap Gas / Explosive
  - 606.6 Terhadap Serangga
  - 606.7 Terhadap Radiasi Atom
- 607 Peralatan Pekerjaan Umum dan Ketenagaan
  - 607.1 Alat-Alat Berat
- 608 Mobil Pemadam Kebakaran
- 609 Jasa Konsultan
- 610 PENGAIRAN**
- 611 Irigasi
  - 611.1 Bangunan Waduk
    - 611.1.1 Bendungan
  - 611.2 Tanggul
  - 611.3 Pelimpahan Banjir
  - 611.4 Menara Pengambilan
  - 611.5 Pembangunan Dermaga
  - 611.6 Bangunan Pengambilan
  - 611.7 Bangunan DAM
    - 611.7.1 Bendung
    - 611.7.2 Bendung dengan pintu bilas
    - 611.7.3 Bendung dengan pompa
    - 611.7.4 Pengambilan Bebas
    - 611.7.5 Pengambilan Bebas dengan Pompa
    - 611.7.6 Sumur dengan pompa
    - 611.7.7 Kantung Lumpur
    - 611.7.8 Silf Ekstreter
    - 611.7.9 Escape Chenel

- 611.8 Bangunan Pembawa
- 611.8.1 Saluran
  - 611.8.1.1 Saluran Induk
  - 611.8.1.2 Saluran Sekunder
  - 611.8.1.3 Suplesi
  - 611.8.1.4 Tersier
  - 611.8.1.5 Saluran Kwartar
  - 611.8.1.6 Saluran Pasangan
  - 611.8.1.7 Saluran Tertutup / Terowongan
- 611.8.2 Bangunan
  - 611.8.2.1 Bangunan Bagi
  - 611.8.2.2 Bangunan Bagi dan Sadap
  - 611.8.2.3 Bangunan Sadap
  - 611.8.2.4 Bangunan Check
  - 611.8.2.5 Bangunan Terjun
- 611.8.3 Bax Tersier
- 611.8.4 Got Miring
- 611.8.5 Talang
- 611.8.6 Syphon
- 611.8.7 Gorong-gorong
- 611.8.8 Pelimpahan Samping
- 611.9 Bangunan Pembuangan
  - 611.9.1 Saluran
    - 611.9.1.1 Saluran Pembuang Induk
    - 611.9.1.2 Saluran Pembuang Sekunder
    - 611.9.1.3 Saluran Pembuang Tersier
  - 611.9.2 Bangunan
    - 611.9.2.1 Bangunan Out Let
    - 611.9.2.2 Bangunan Terjun
    - 611.9.2.3 Bangunan Penahan Banjir
  - 611.9.3 Gorong-gorong pembuang
  - 611.9.4 Talang Pembuang
  - 611.9.5 Syphon Pembuang
- 611.10 Bangunan Lainnya
  - 611.10.1 Jalan
    - 611.10.1.1 Jalan Inspeksi
    - 611.10.1.2 Jalan Logistik
  - 611.10.2 Jembatan
    - 611.10.2.1 Jembatan Inspeksi
    - 611.10.2.2 Jembatan Hewan
  - 611.10.3 Tangga cuci
  - 611.10.4 Kubangan Kerbau
  - 611.10.5 Waduk Lapangan
  - 611.10.6 Bangunan Penunjang
  - 611.10.7 Jaringan Telepon
  - 611.10.8 Stasiun Agro
  - 611.10.9 Bangunan TPI dan Pasar Ikan
- 612 Polder
  - 612.1 Tanggul Keliling
    - 612.1.1 Tanggul
    - 612.1.2 Bangunan Penutup Sungai
    - 612.1.3 Jembatan
  - 612.2 Bangunan Pembawa

- 612.2.1 Saluran
  - 612.2.1.1 Saluran Muka
  - 612.2.1.2 Saluran Pembawa Induk
  - 612.2.1.3 Saluran Pembawa Sekunder
  - 612.2.1.4 Saluran Stasiun Pompa Pemasukan
- 612.2.2 Bangunan Bagi
  - 612.2.2.1 Gorong-gorong
  - 612.2.2.2 Syphon
- 612.3 Bangunan Pembuang
  - 612.3.1 Stasiun Pompa Pembuangan
  - 612.3.2 Saluran
    - 612.3.2.1 Saluran Pembawa Induk
    - 612.3.2.2 Saluran Pembawa Sekunder
  - 612.3.3 Pintu Air Pembuangan
  - 612.3.4 Gorong-gorong Pembuangan
  - 612.3.5 Syphon Pembuangan
- 612.4 Bangunan Lainnya
  - 612.4.1 Bangunan
    - 612.4.1.1 Bangunan Pengukur Air
    - 612.4.1.2 Bangunan Pengukur Curah Hujan
    - 612.4.1.3 Bangunan Gudang Stasiun Pompa
    - 612.4.1.4 Bangunan Listrik Stasiun Pompa
- 612.5 Rumah Petugas Eksploitasi
- 613 Pasang Surut
  - 613.1 Bangunan Pembawa
    - 613.1.1 Saluran
      - 613.1.1.1 Saluran Pembawa Induk
      - 613.1.1.2 Saluran Pembawa Sekunder
      - 613.1.1.3 Saluran Pembawa Tersier
      - 613.1.1.4 Saluran Penyimpanan Air
      - 613.1.1.5 Bangunan Pintu Pemasukan
  - 613.2 Bangunan Pembuang
    - 613.2.1 Saluran
      - 613.2.1.1 Saluran Pembawa Induk
      - 613.2.1.2 Saluran Pembawa Sekunder
      - 613.2.1.3 Saluran Pembawa Tersier
      - 613.2.1.4 Saluran Penyimpanan Air
      - 613.2.1.5 Bangunan Pintu Pemasukan
  - 613.3 Bangunan Lainnya
    - 613.3.1 Kolom Pasang
    - 613.3.2 Saluran
      - 613.3.2.1 Saluran Lalu Lintas
      - 613.3.2.2 Saluran Muka
    - 613.3.3 Bangunan
      - 613.3.3.1 Bangunan Penangkis Kotoran
      - 613.3.3.2 Bangunan Pengukur Muka Air
      - 613.3.3.3 Bangunan Pengukur Curah Hujan
    - 613.3.4 Jalan
    - 613.3.5 Jembatan
- 614 Pengendalian Sungai
  - 614.1 Bangunan Pengaman
    - 614.1.1 Tanggul Banjir
    - 614.1.2 Pintu Pengatur Banjir

614.1.3	Klep Pengatur Banjir
614.1.4	Tembok Pengaman Talut
614.1.5	Krib
614.1.6	Kantung Lumpur
614.1.7	Check Dam
614.1.8	Syphon
614.2	Saluran Pengaman
614.2.1	Saluran Banjir
614.2.2	Saluran Drainage
614.2.3	Corepure
614.3	Bangunan lainnya
614.3.1	Warning System
614.3.2	Stasiun
614.3.2.1	Stasiun Pengukur Curah Hujan
614.3.2.2	Stasiun Pengukur Air
614.3.2.3	Stasiun Pengukur Cuaca
614.3.2.4	Stasiun Pos Penjagaan
615	Pengaman Pantai
615.1	Tanggul
615.2	Krib
615.3	Bangunan Lainnya
616	Air Tanah
616.1	Stasiun Pompa
616.2	Bangunan Pembawa
616.3	Bangunan Pembuang
616.4	Bangunan Lainnya
617	-
618	-
619	-
<b>620</b>	<b>JALAN</b>
620.1	Kriteria Jalan
620.1.1	Jalan Desa
620.1.2	Jalan Kabupaten
620.1.3	Jalan Provinsi
620.1.4	Jalan Nasional
621	Jalan Kota
621.1	Daerah Penguasaan
621.1.1	Tanah
621.1.2	Tanaman
621.1.3	Bangunan
621.2	Bangunan Sementara
621.2.1	Jalan Sementara
621.2.2	Kantor Proyek
621.2.3	Gedung Proyek
621.2.4	Barak Kerja
621.2.5	Laboratorium Lapangan
621.2.6	Rumah
621.3	Badan Jalan
621.3.1	Pekerjaan Tanah (Earth Work)
621.3.2	Stabilisasi
621.4	Perkerasan
621.4.1	Lapisan Pondasi Bawah
621.4.2	Lapisan Pondasi

621.4.3	Lapisan Permukaan
621.5	Drainage
621.5.1	Parit Tanah
621.5.2	Gorong-gorong (Culvert)
621.6	Buku Trotoir
621.6.1	Tanah
621.6.2	Perkerasan
621.6.3	Pasangan
621.7	Medium
621.7.1	Tanah
621.7.2	Tanaman
621.7.3	Perkerasan
621.7.4	Pasangan
621.8	Daerah Samping
621.8.1	Tanaman
621.8.2	Pagar
621.9	Bangunan Pelengkap dan Pengaman
621.9.1	Rambu-rambu / Tanda-tanda Lalu Lintas
621.9.2	Lampu Penerangan
621.9.3	Lampu Pengatur Lalu Lintas
621.9.4	Patok-Patok KM
621.9.5	Patok-Patok R.O.W. (Sempadan)
621.9.6	Rel Pengaman
621.9.7	Pagar
621.9.8	Turap Penahan
621.9.9	Bronjong
622	Jalan Luar Kota / Jalan Provinsi
622.1	Daerah Penguasaan
622.1.1	Tanah
622.1.2	Tanaman
622.1.3	Bangunan
622.1.4	Jalan Sementara
622.1.5	Jembatan Sementara
622.1.6	Kantor/Gedung Proyek
622.1.7	Barak Kerja
622.1.8	Laboratorium Pangan
622.1.9	Rumah
622.2	Badan Jalan
622.2.1	Pekerjaan Tanah (Earth Work)
622.2.2	Stabilisasi
622.3	Perkerasan (Pavement)
622.3.1	Lapis Pondasi Bawah
622.3.2	Lapis Pondasi
622.3.3	Lapis Permukaan
622.4	Drainage
622.4.1	Parit
622.4.2	Gorong-Gorong (Culvert)
622.4.3	Buku Trotoir
622.4.4	Tanah
622.4.5	Perkerasan
622.5	Trotoir
622.5.1	Tanah
622.5.2	Perkerasan

622.6	Medium
622.6.1	Tanah
622.6.2	Tanaman
622.6.3	Perkerasan
622.6.4	Pasangan
622.7	Daerah Samping
622.7.1	Tanaman
622.7.2	Pagar
622.8	Bangunan Pelengkap dan Pengamanan
622.8.1	Rambu-rambu
622.8.2	Lampu Penerangan
622.8.3	Lampu Pengatur Lalu Lintas
622.8.4	Patok-patok KM
622.8.5	Patok-Patok R.O.W (Sempadan)
622.8.6	Rel Pengaman
622.8.7	Pagar
622.8.8	Turap Penahan
622.8.9	Bronjong
623	Jalan Nasional
623.1	Jalan Penguasaan
623.2	Badan Jalan
623.3	Perkerasan (Lapisan Pondasi, Lapisan Permukaan)
623.4	Drinase (Gorong-Gorong, Parit)
623.5	Median
623.6	Daerah Samping (Pagar, Tanaman)
623.7	Bangunan Pelengkap dan Bangunan Pengaman (Rambu-Rambu)
624	-
625	-
626	-
627	-
628	-
629	-
<b>630</b>	<b>JEMBATAN</b>
631	Jembatan Pada Jalan Kota
631.1	Daerah Penguasaan
631.1.1	Tanah
631.1.2	Tanaman
631.1.3	Bangunan
631.2	Bangunan Sementara
631.2.1	Jalan Sementara
631.2.2	Jembatan Sementara
631.2.3	Kantor Proyek
631.2.4	Gedung Proyek
631.2.5	Barak Kerja
631.2.6	Laboratorium Lapangan
631.2.7	Rumah
631.3	Pekerjaan Tanah (Earth Work)
631.3.1	Galian Tanah
631.3.2	Timbunan Tanah
631.4	Pondasi
631.4.1	Pondasi Kepala Jembatan
631.4.2	Pondasi Pilar
631.4.3	Pondasi Angker



631.5	Bangunan Bawah
631.5.1	Kepala Jembatan
631.5.2	Pilar
631.5.3	Piloon
631.5.4	Landasan
631.6	Bangunan
631.6.1	Gelagar
631.6.2	Lantai
631.6.3	Perkerasan
631.6.4	Jalan Orang / Trotoir
631.6.5	Sandaran
631.6.6	Talang Air
631.7	Bangunan Pengaman
631.7.1	Turap / Penahan
631.7.2	Bronjong
631.7.3	Strek Dam
631.7.4	Kist Dam
631.7.5	Coupute
631.7.6	Krip
631.8	Bangunan Pelengkap
631.8.1	Rambu-rambu / Tanda-tanda Lalu Lintas
631.8.2	Patok Pengaman
631.8.3	Patok R.O.W (Sempadan)
631.9	Oprit
631.9.1	Badan
631.9.2	Perkerasan
631.9.3	Drainage
631.9.4	Baku
631.9.5	Medium
632	Jembatan pada Jalan Luar Kota
632.1	Daerah Penguasaan
632.1.1	Tanah
632.1.2	Tanaman
632.1.3	Bangunan
632.2	Bangunan Sementara
632.2.1	Jalan Sementara
632.2.2	Jembatan Sementara
632.2.3	Kantor Proyek
632.2.4	Gedung Proyek
632.2.5	Barak Kerja
632.2.6	Laboratorium Lapangan
632.2.7	Rumah
632.3	Pekerjaan Tanah (Earth Work)
632.3.1	Galian Tanah
632.3.2	Timbunan Tanah
632.4	Pondasi
632.4.1	Pondasi Kepala Jembatan
632.4.2	Pondasi Pilar
632.4.3	Pondasi Angker
632.5	Bangunan Bawah
632.5.1	Kepala Jembatan
632.5.2	Pilar
632.5.3	Piloon

632.5.4	Landasan
632.6	Bangunan
632.6.1	Gelagar
632.6.2	Lantai
632.6.3	Perkerasan
632.6.4	Jalan Orang / Trotoir
632.6.5	Sandaran
632.6.6	Talang Air
632.7	Bangunan Pengaman
632.7.1	Turap / Penahan
632.7.2	Bronjong
632.7.3	Strek Dam
632.7.4	Kist Dam
632.7.5	Coupute
632.7.6	Krip
632.8	Bangunan Pelengkap
632.8.1	Rambu-rambu / Tanda-tanda Lalu Lintas
632.8.2	Patok Pengaman
632.8.3	Patok R.O.W (Sempadan)
632.9	Oprit
632.9.1	Badan
632.9.2	Perkerasan
632.9.3	Drainage
632.9.4	Baku
632.9.5	Medium
633	Jembatan pada Jalan Nasional
633.1	Daerah Penguasaan (Tanaman, Tanah, Bangunan)
633.2	Bangunan Sementara (Gudang Proyek, Kantor Proyek)
633.3	Pondasi
633.4	Bangunan Bawah
633.5	Bangunan (Gelagar, Lantai, Sandaran, Perkerasan)
633.6	Bangunan Pengamanan (Bronjong strek dam, krib)
633.7	Bangunan Pelengkap dan Pengaman (Rambu-Rambu)
634	-
635	-
636	-
637	-
638	-
639	-
<b>640</b>	<b>BANGUNAN</b>
641	Bangunan Pemerintah
641.1	Gedung Pengadilan
641.2	Rumah Pejabat Negara
641.3	Gedung DPRD
641.4	Gedung SETDA
641.5	Penjara
641.6	Perkantoran
641.7	Pendopo
642	Bangunan Pendidikan
642.1	Taman Kanak-Kanak
642.2	SD & Sekolah Menengah
642.3	Perguruan Tinggi
643	Bangunan Rekreasi

- 643.1            Bangunan Olah Raga
- 643.2            Gedung Kesenian
- 643.3            Gedung Pemancar
- 644            Bangunan Perdagangan
  - 644.1            Pusat Perbelanjaan
  - 644.2            Gedung Perdagangan (SCJ, Showroom)
  - 644.3            Bank
  - 644.4            Perkantoran
- 645            Bangunan Pelayanan Umum
  - 645.1            Mandi, Cuci, Kakus (MCK) Umum
  - 645.2            Tempat Parkir
  - 645.3            Rumah Sakit
  - 645.4            Gedung Telkom
  - 645.5            Terminal Angkutan Udara
  - 645.6            Terminal Angkutan Air
  - 645.7            Terminal Angkutan Darat
  - 645.8            Bangunan Keagamaan
- 646            Bangunan Peninggalan Sejarah
  - 646.1            Monumen, Tugu
  - 646.2            Menara Kudus
  - 646.3            Klenteng
  - 646.4            Candi
  - 646.5            Keraton
  - 646.6            Rumah Tradisional
- 647            Bangunan Industri
- 648            Bangunan Tempat Tinggal
  - 648.1            Rumah Perkantoran
    - 648.1.1            Inti / Sederhana
    - 648.1.2            Sedang / Mewah
  - 648.2            Rumah Pedesaan
    - 648.2.1            Rumah Contoh
  - 648.3            Real Estate
- 649            Elemen Bangunan
  - 649.1            Pondasi
    - 649.1.1            Di Atas Tiang
  - 649.2            Dinding
    - 649.2.1            Penahan Beban
    - 649.2.2            Tidak menahan Beban
  - 649.3            Atap
  - 649.4            Lantai / Langit-Langit
    - 649.4.1            Suspendend
    - 649.4.2            Solit
  - 649.5            Pintu / Jendela
    - 649.5.1            Pintu Hermonik
    - 649.5.2            Pintu Biasa
    - 649.5.3            Pintu Sorong
    - 649.5.4            Jendela Kayu
    - 649.5.5            Jendela Sorong
    - 649.5.6            Jendela Vertikal
- 650            TATA RUANG KOTA**
- 651            Daerah Perdagangan / Pelabuhan
  - 651.1            Daerah Pusat Perbelanjaan
  - 651.2            Daerah Perkantoran

- 652 Daerah Pemerintahan
- 653 Daerah Perumahan (*Site & Serve*)
  - 653.1 Kepadatan Rendah (*Low Density*)
  - 653.2 Kepadatan Tinggi (*High Density*)
- 654 Daerah Industri
  - 654.1 Industri Berat
  - 654.2 Industri Ringan
  - 654.3 Industri Rumah (*Home Industry*)
- 655 Daerah Rekreasi (*Open Space*)
  - 655.1 Publik Garden
  - 655.2 Sport & Playing Fields
  - 655.3 Open Space
- 656 Transportasi (Tata Letak)
  - 656.1 Jaringan Jalan
    - 656.1.1 Penerangan Jalan
  - 656.2 Jaringan Kereta Api
  - 656.3 Jaringan Sungai
- 657 Assineering
  - 657.1 Saluran Pengumpulan
  - 657.2 Instansi Pengolahan
    - 657.2.1 Bangunan
    - 657.2.2 Bangunan Penyaring
    - 657.2.3 Bangunan Penghancur Kotoran
    - 657.2.4 Bangunan Pengendapan
    - 657.2.5 Bangunan Pengereng Lumpur
    - 657.2.6 Unit Disinfektan
    - 657.2.7 Unit Perpompaan
- 658 Kesehatan Lingkungan
  - 658.1 Persampahan
    - 658.1.1 Bangunan Pengumpul
    - 658.1.2 Bangunan Pemusnahan
  - 658.2 Pengotoran Udara
  - 658.3 Pengotoran Air
    - 658.3.1 Air Buangan Industri
  - 658.4 Kegaduan
  - 658.5 Kebersihan Kota
- 659 Tempat Pembuangan Akhir Sampah
- 660 TATA LINGKUNGAN**
  - 660.1 Lingkungan Hidup
  - 660.2 Kebersihan Lingkungan
  - 660.3 Pencemaran
    - 660.3.1 Pencemaran Air
    - 660.3.2 Pencemaran Udara
    - 660.3.3 Pencemaran Tanah
- 661 Daerah Hutan
- 662 Daerah Pertanian / Perkebunan
- 663 Daerah Pemukiman
- 664 Pusat Pertumbuhan
- 665 Transportasi
  - 665.1 Jaringan Jalan
  - 665.2 Jaringan Kereta Api
  - 665.3 Jaringan Sungai
- 666 Limbah

- 666.1 Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- 666.2 Limbah Cair
- 666.3 Limbah Padat
- 666.4 Limbah Gas
- 667 Kajian Lingkungan Hidup
  - 667.1 Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)
    - 667.1.1 Komisi Penilai AMDAL (Pusat, Daerah)
    - 667.1.2 Tes / Uji Laboratorium Lingkungan Hidup
  - 667.2 Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL)
- 668 Audit Lingkungan
- 669 Program-program Lingkungan Hidup
  - 669.1 Program Kali Bersih (Prokasih)
  - 669.2 Program Langit Biru
  - 669.3 Program Bersih Pantai
- 670 KETENAGAAN / KELISTRIKAN**
- 671 Listrik
  - 671.1 Kelistrikan
    - 671.1.1 Kelistrikan PLN
    - 671.1.2 Kelistrikan Non PLN
  - 671.2 Pembangkit Tenaga Listrik
    - 671.2.1 PLTA – Pembangkit Listrik Tenaga Air
    - 671.2.2 PLTD – Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
    - 671.2.3 PLTG – Pembangkit Listrik Tenaga Gas
    - 671.2.4 PLTN – Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir
    - 671.2.5 PLTN – Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
    - 671.2.6 PLTU – Pembangkit Listrik Tenaga Uap
  - 671.3 Transmisi Tenaga Listrik
    - 671.3.1 Gardu Induk / Gardu Penghubung / Gardu Trafo
    - 671.3.2 Saluran Udara Tegangan Tinggi
    - 671.3.3 Kabel Bawah Tanah
    - 671.3.4 Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi
  - 671.4 Distribusi Tenaga Listrik
    - 671.4.1 Gardu Distribusi
    - 671.4.2 Tegangan Menengah
    - 671.4.3 Tegangan Rendah
    - 671.4.4 Jaringan Bawah Tanah
  - 671.5 Pengusahaan Listrik
    - 671.5.1 Sambungan Listrik
    - 671.5.2 Penjualan Tenaga Listrik
    - 671.5.3 Tarif Listrik
- 672 Tenaga Air
- 673 Tenaga Minyak
- 674 Tenaga Gas
- 675 Tenaga Matahari
- 676 Tenaga Nuklir
- 677 Tenaga Panas Bumi
- 678 Tenaga Uap
- 679 Tenaga Lainnya
- 680 PERALATAN PEKERJAAN UMUM**
- 681 -
- 682 -
- 683 -
- 684 -

685	-
686	-
687	-
688	-
689	-
<b>690</b>	<b>AIR MINUM</b>
691	Intako
691.1	Bromcaptering
691.2	Sumur
691.3	Bendungan
691.4	Saringan (Screen)
691.5	Pintu Air
691.6	Saluran Pembawa
691.7	Alat Ukur
691.8	Perpompaan
692	Transmisi Air Baku
692.1	Perpipaan
692.2	Katup Udara (Air Relief)
692.3	Tutup Penguras (Blow Off)
692.4	Bak Pelepas Tekanan
692.5	Jembatan Pipa
692.6	Syphon
693	Instalasi Pengelolaan
693.1	Bangunan Ukur
693.2	Bangunan Aerasi
693.3	Bangunan Pengendapan
693.4	Bangunan Pembubuh Bahan Kimia
693.5	Bangunan Pengaduk
693.6	Bangunan Saringan
693.7	Perpompaan
693.8	Clear Hell
694	Distribusi
694.1	Reservoir Menara Bawah Tanah
694.1.1	Menara
694.1.2	Reservoir di bawah Tanah
694.2	Perpipaan
694.3	Perpompaan
694.4	Jembatan Pipa
694.5	Syphon
694.6	Hydran
694.6.1	Hydran Umum
694.6.2	Hydran Kebakaran
694.7	Katup
694.7.1	Katup Udara (Air Relief)
694.7.2	Katup Pelepas (Blow Off)
694.8	Bak Pelepas Tekanan (Pressuer Reducing Valve)
695	-
696	-
697	-
698	-
699	-
<b>700</b>	<b>PENGAWASAN</b>
700.1	Kebijakan dan Program Pengawasan

- 700.2 Pengawasan Perencanaan Pengadaan / Proyek
- 701 Pengawasan Urusan Dalam meliputi pengawasan sarana dan fasilitas kantor
- 702 Pengawasan Peralatan
- 703 Pengawasan Kekayaan / Inventarisasi Asset
- 704 Pengawasan Perpustakaan dan Dokumen
- 705 Pengawasan Perhubungan, Komunikasi Informasi dan Teknologi
- 706 Pengawasan Organisasi dan Tata Laksana
- 707 Pengawasan Penelitian / Riset
- 708 Pengawasan Konferensi / Rapat Dinas
- 709 Pengawasan Perjalanan Dinas Pejabat / PNS
- 710 BIDANG PEMERINTAHAN**
- 711 Pengawasan Pemerintah Pusat
- 712 Pengawasan Pemerintah Provinsi
- 713 Pengawasan Pemda Kabupaten / Kota
- 713.1 Pengawasan APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) Kabupaten
  - 713.1.1 Koordinasi dan konsultasi pengawasan
  - 713.1.2 Panggilan
  - 713.1.3 Perintah Tugas
  - 713.1.4 PKS (Pelatihan di Kantor Sendiri) / Bintek
  - 713.1.5 Pemeriksaan
    - Klasifikasikan disini pemeriksaan berkala sesuai PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan), pemeriksaan dan penanganan kasuk/khusus, pemeriksaan non PKPT lainnya.
  - 713.1.6 Evaluasi
  - 713.1.7 Monitoring
  - 713.1.8 Review
  - 713.1.9 Pelaporan Pengawasan
    - 713.1.9.1 Laporan hasil pemeriksaan (LHP)
      - Klasifikasikan disini LHP berkala, kasus, Khusus, dan Non PKPT lainnya
    - 713.1.9.2 Laporan Hasil Evaluasi (LHE)
    - 713.1.9.3 Laporan Hasil Review (LHR)
  - 713.2.0 Pengawasan Pembinaan
    - 713.2.1 Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor
- 714 Pengawasan Pemerintah Desa
- 715 -
- 716 -
- 717 -
- 718 -
- 719 -
- 720 BIDANG POLITIK**
- 721 Pengawasan Partai
  - 721.1 Keanggotaan
  - 721.2 Pendirian / Pembubaran
  - 721.3 Pelanggaran Pemasangan Atribut Partai
- 722 Pengawasan Pembinaan Ipoleksosbud Hankam
- 723 Pengawasan Organisasi meliputi organisasi kemasyarakatan, profesi, wanita, buruh/tani dan kepemudaan
- 724 Pengawasan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME
- 725 -
- 726 -

727 -  
728 -  
729 -

**730 BIDANG KEAMANAN / KETERTIBAN**

731 Pengawasan Kesbangpolinmas  
732 Pengawasan SAR / bencana  
733 Pengawasan Keamanan  
734 Pengawasan Perlindungan Masyarakat  
735 Pengawasan Bencana Alam  
736 Pengawasan Lingkungan Hidup  
737 -  
738 -  
739 -

**740 BIDANG KESRA**

741 Pengawasan Pembangunan Desa  
742 Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan  
742.1 Kesejahteraan Guru  
742.2 Fasilitas / Sarana  
742.3 Mutu Pendidikan  
743 Pengawasan Kebudayaan  
743.1 Kebudayaan Daerah / Nasional  
743.2 Kebudayaan Asing  
744 Pengawasan Kesehatan / Makanan / Obat  
745 Pengawasan SARA (Suku, Agama, Ras)  
746 Pengawasan Kesejahteraan Sosial  
747 Pengawasan Kependudukan Migrasi / Urbanisasi  
748 Pengawasan Kehumasan / Media Massa  
749 Pengawasan Bantuan / Subsidi Masyarakat

**750 BIDANG PEREKONOMIAN**

751 Pengawasan Perdagangan dan Perindustrian  
752 Pengawasan Kehutanan, Pertanian, Perkebunan dan Perikanan  
753 Pengawasan Peternakan dan Kesehatan Hewan  
754 Pengawasan Pertambangan / ESDM  
755 Pengawasan Perhubungan  
756 Pengawasan Tenaga Kerja dan Ketransmigrasian  
757 Pengawasan PMDN / PMDA  
758 Pengawasan Perbankan / Moneter  
759 Pengawasan Pertahanan / BPN

**760 BIDANG PEKERJAAN UMUM**

761 Pengawasan Pengairan  
762 Pengawasan Jalan  
763 Pengawasan Jembatan  
764 Pengawasan Bangunan  
765 Pengawasan Tata Ruang Kota  
766 Pengawasan Tata Lingkungan  
767 Pengawasan Ketenagaan  
768 Pengawasan Peralatan  
769 Pengawasan Air Minum



**770 PENGAWASAN PEJABAT PUBLIK**

- 771 Pemilihan Gubernur / Bupati / Walikota
- 772 Serah Terima Jabatan Publik
- 773 Laporan Pertanggungjawaban Pusat
- 774 Laporan Pertanggungjawaban Gubernur
- 775 Laporan Pertanggungjawaban Bupati / Walikota
- 776 Penolakan LPJ
- 777 Penyimpangan Pejabat Publik
- 778 Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara
- 779 Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)

**780 BIDANG KEPEGAWAIAN**

- 781 Pengawasan Pengadaan PNS / Pengangksatan dan Mutasi
- 782 Pengawasan Penilaian dan Disiplin PNS
- 783 Keanggotaan PNS dalam Parpol
- 784 Penyimpangan pejabat / PNS
  - 784.1 Persengketaan PNS
  - 784.2 Pembunuhan
  - 784.3 Penganiayaan / Perampokan / Pencurian
  - 784.4 Pemalsuan
  - 784.5 Tindakan asusila / pelecehan Seksual
  - 784.6 Korupsi/Penyalahgunaan Jabatan Struktural
- 785 Pengawasan Cuti
- 786 Pengawasan Pemberhentian PNS
- 787 Pengawasan Tata Usaha / Administrasi PNS
- 788 Pengawasan Pendidikan PNS
- 789 -

**790 BIDANG KEUANGAN**

- 791 Pengawasan Anggaran / APBD
- 792 Akuntansi
- 793 Pengawasan Perbendaharaan
  - 793.1 Pengawasan Pembinaan Perbendaharaan
- 794 Pengawasan Pengelolaan Kas Daerah
  - 794.1 Pengawasan Bendaharawan/pemegang kas
- 795 Pengawasan Pendapatan / Penerimaan Pajak
- 796 Pengawasan Keuangan Pendidikan PNS
- 797 Pengawasan Otorisasi
- 798 Pengawasan Verifikasi
- 799 Pengawasan Pembukuan

**800 KEPEGAWAIAN**

Klasifikasi di sini : Kebijakan Kepegawaian

- 800.1 Perencanaan
- 800.2 Penelitian
  - 800.2.1 Pengaduan
  - 800.2.2 Team
  - 800.2.3 Statistik
  - 800.2.4 Peraturan Perundang-Undang
- 801 -
- 802 -
- 803 -
- 804 -
- 805 -
- 806 -
- 807 -

808 -  
809 -  
**810 PENGADAAN**  
Meliputi Lamaran, Pengujian kesehatan dan pengangkatan calon Pegawai

811 Lamaran  
811.1 Testing  
811.2 Screening  
811.3 Panggilan  
812 Pengujian Kesehatan  
813 Pengangkatan Calon Pegawai  
813.1 Pengangkatan Calon Pegawai Golongan I  
813.2 Pengangkatan Calon Pegawai Golongan II  
813.3 Pengangkatan Calon Pegawai Golongan III  
813.4 Pengangkatan Calon Pegawai Golongan IV  
813.5 Pengangkatan Calon Guru  
814 Pengangkatan Tenaga Tidak Tetap  
814.1 Pengangkatan Tenaga Bulanan  
814.2 Pengangkatan Tenaga Harian  
814.3 Pengangkatan Tenaga Kontrak  
815 Pengangkatan Tenaga Asing  
816 -  
817 -  
818 -  
819 -

**820 PENGANGKATAN DAN MUTASI**

820.1 Golongan I  
820.2 Golongan II  
820.3 Golongan III  
820.4 Golongan IV  
820.5 Fungsional  
821 Pengangkatan  
821.1 Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Tetap)  
821.1.1 Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Gol I  
821.1.2 Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Gol II  
821.1.3 Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Gol III  
821.1.4 Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Gol IV  
821.2 Pengangkatan Dalam Jabatan, Pembebasan Dari Jabatan, Berita Acara Serah Terima Jabatan  
821.2.1 Eselon 1  
821.2.2 Eselon 2  
821.2.3 Eselon 3  
821.2.4 Eselon 4  
821.3 Penilaian / penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional  
821.3.1 Arsiparis  
821.3.2 Pustakawan  
821.3.3 Guru  
821.3.4 Paramedis  
821.3.5 Pranata Komputer  
821.3.6 Penyuluh Pertanian  
821.3.7 Auditor  
821.3.8 Jabatan Fungsional lainnya.  
822 Kenaikan Gaji Berkala

- 822.1 PNS Golongan I
- 822.2 PNS Golongan II
- 822.3 PNS Golongan III
- 822.4 PNS Golongan IV
- 823 Kenaikan Pangkat / Pengangkatan
  - 823.1 PNS Golongan I
  - 823.2 PNS Golongan II
  - 823.3 PNS Golongan III
  - 823.4 PNS Golongan IV
- 824 Pemindahan / Pelimpahan / Perbantuan
  - 824.1 PNS Golongan I
  - 824.2 PNS Golongan II
  - 824.3 PNS Golongan III
  - 824.4 PNS Golongan IV
- 825 Detasering dan Penempatan Kembali
- 826 Penunjukan Tugas Belajar
  - 826.1 Dalam Negeri
  - 826.2 Luar Negeri
  - 826.3 Tunjangan Belajar
  - 826.4 Penempatan Kembali
  - 826.5 Ijin Belajar
  - 826.6 Pemakaian Gelar
- 827 Wajib Militer
- 828 Mutasi Pegawai Instansi lain
- 829 -

**830 KEDUDUKAN**

- 831 Perhitungan Masa Kerja
- 832 Penyesuaian Pangkat / Gaji
  - 832.1 PNS Golongan I
  - 832.2 PNS Golongan II
  - 832.3 PNS Golongan III
  - 832.4 PNS Golongan IV
- 833 Penghargaan Ijasah
- 834 Penghargaan Teknologi Tepat Guna
- 835 Penghargaan Humas
- 836 Penghargaan Lingkungan Hidup
- 837 Penghargaan Kemanusiaan
- 838 Penghargaan Kewirausahaan
- 839 Penghargaan Lainnya

**840 KESEJAHTERAAN PEGAWAI**

- 841 Tunjangan
  - 841.1 Strukturan dan Fungsional
  - 841.2 Kehormatan
  - 841.3 Dana Kematian (Uang Duka)
  - 841.4 Tambahan Fungsional
  - 841.5 Tunjangan Cacat
  - 841.6 Keluarga
  - 841.7 Pangan, Uang makan
- 842 Dana
  - 842.1 Taspen
  - 842.2 Askes, Bantuan Kesehatan
  - 842.3 Bantuan Pendidikan
- 843 Perawatan Kesehatan

843.1	Poliklinik, Klinik Konsultasi
843.2	Perawatan Dokter
843.3	Obat-obatan
843.4	Keluarga Berencana
844	Koperasi / Distribusi
844.1	Distribusi Pangan
844.2	Distribusi Sandang
844.3	Distribusi Lainnya
845	Perumahan PNS
846	Bantuan Sosial
846.1	Bantuan Kebakaran
846.2	Bantuan Kebanjiran
847	Rekreasi
848	Dispensasi
849	-
<b>850</b>	<b>CUTI</b>
851	Cuti Tahunan
852	Cuti Besar
853	Cuti Sakit
854	Cuti Hamil / Bersalin
855	Cuti Naik Haji
856	Cuti Diluar Tanggungan Negara
857	Cuti Alasan Penting
858	-
859	-
<b>860</b>	<b>PENILAIAN</b>
861	Penghargaan
861.1	Bintang / Satyalencana
861.2	Kenaikan Pangkat Anumerta
861.3	Kenaikan Gaji Istimewa
861.4	Hadiah Berupa Pangkat
861.5	Pegawai Teladan
862	Hukuman
862.1	Teguran / Peringatan
862.2	Penundaan Kenaikan gaji
862.3	Penurunan Pangkat
862.4	Pemindahan
863	Konduite
864	Ujian Dinas
864.1	Tingkat I
864.2	Tingkat II
864.3	Tingkat III
865	Penilaian Kehidupan Pegawai Negeri
865.1	Kasus – kasus pelanggaran disiplin / ijin cerai / menikah lagi
866	Rehabilitasi
867	Pembinaan Disiplin Pegawai
868	-
869	-
<b>870</b>	<b>TATA USAHA KEPEGAWAIAN</b>
871	Formasi
872	Bezetting
873	Registrasi
873.1	NIP

- 873.2 KARPEG
- 873.3 Legitimasi / Tanda Pengenal
- 873.4 Daftar Keluarga
- 873.5 KARSU / KARIS
- 874 Daftar Riwayat Pekerjaan
  - 874.1 Tanggal Lahir
  - 874.2 Penggantian Nama
  - 874.3 Kepartaian / Organisasi
- 875 Kewenangan Mutasi Kepegawaian
  - 875.1 Pelimpahan Wewenang
  - 875.2 Spesimen Tanda Tangan
- 876 Penggajian
  - 876.1 Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP)
- 877 Sumpah / Janji
- 878 Korps Kepegawaian
- 879 Sosialisasi Peraturan – Peraturan Kepegawaian
- 880 PEMBERHENTIAN**
- 881 Permintaan Sendiri
  - 882 Dengan Hak Pensiun
    - 882.1 Pemberhentian dengan hak pensiun Peg. Neg. Gol. I
    - 882.2 Pemberhentian dengan hak pensiun Peg. Neg. Gol. II
    - 882.3 Pemberhentian dengan hak pensiun Peg. Neg. Gol. III
    - 882.4 Pemberhentian dengan hak pensiun Peg. Neg. Gol. IV
    - 882.5 Pensiun Janda / Duda
    - 882.6 Pensiun Yatim Piatu
    - 882.7 Uang Muka Pensiun
- 883 Karena Meninggal
  - 883.1 Karena Meninggal dalam tugas
- 884 Alasan Lain
- 885 Uang Pesangon
- 886 Uang Tunggu
- 887 Sementara Waktu
- 888 Tidak dengan hormat
- 889 Pemberhentian Tenaga Kontrak Daerah
- 890 PENDIDIKAN PEGAWAI**
- 891 Perencanaan
  - 892 Pendidikan Reguler
    - 892.1 IIP
    - 892.2 Diploma
      - 892.2.1 Diploma I
      - 892.2.2 Diploma II
      - 892.2.3 Diploma III
      - 892.2.4 Diploma IV
    - 892.3 Sarjana (S1)
    - 892.4 Pasca Sarjana (S2)
    - 892.5 Doktor (S3)
    - 892.6 Kursus-kursus Reguler
  - 893 Pendidikan Non Reguler
    - 893.1 Diklat Struktural
      - 893.1.1 Diklat Pimpinan IV
      - 893.1.2 Diklat Pimpinan III
      - 893.1.3 Diklat Pimpinan II
      - 893.1.4 Diklat Pimpinan I

893.2	Diklat Fungsional
893.3	Kursus-kursus Penataran
894	Pengembangan Pegawai
894.1	Tugas Belajar
894.2	Ijin Belajar
894.3	Tunjangan Belajar
894.4	Bantuan Pendidikan
894.5	Penempatan Kembali
895	Metode
895.1	Kuliah
895.2	Ceramah, Symposium
895.3	Diskusi
895.4	Kuliah Lapangan, Widya Wisata, KKN
895.5	Kurikulum
895.6	Karya Tulis
896	Tenaga Pengajar (Widyaiswara)
897	Administrasi Pendidikan
897.1	Tahun Pelajaran
897.2	Persyaratan, meliputi Pendaftaran, testing, ujian
898	Fasilitas Pendidikan
898.1	Tunjangan Belajar / Beasiswa
898.2	Asrama
898.3	Uang Makan
898.4	Uang Transport
898.5	Uang Buku
899	Sarana Pendidikan
899.1	Buku
899.2	Gedung
<b>900</b>	<b>KEUANGAN</b>
901	Nota Keuangan
902	APBN
903	APBD
904	-
905	-
906	-
907	-
908	-
909	-
<b>910</b>	<b>ANGGARAN</b>
911	Keputusan tentang penunjukan pengelola keuangan OPD/PPKD
912	Keputusan Gubernur tentang penunjukan pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis BLUD
913	DPA/PPA/DPAL-OPD/PPKD
914	Anggaran Kas
915	Surat penyediaan dana
916	-
917	-
918	-
919	-
<b>920</b>	<b>AKUNTANSI</b>
921	Laporan-laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
922	-
923	-

924	-
925	-
926	-
927	-
928	-
929	-
<b>930</b>	<b>PERBENDAHARAAN</b>
931	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
932	Surat Penolakan Penerbitan SP2D
933	Daftar Penguji SP2D
934	-
935	-
936	-
937	-
938	-
939	-
<b>940</b>	<b>PEMBINAAN KEBENDAHARAAN</b>
941	Bintek-bintek / Kursus yang berkaitan dengan keuangan
942	-
943	-
944	-
945	-
946	-
947	-
948	-
949	-
<b>950</b>	<b>PENGELOLAAN KAS DAERAH</b>
951	Laporan pemotongan IWP, Taperum, PPh 21 dari gaji
952	Laporan Rekapitulasi penerimaan daerah
953	Daftar pemotongan dan Penyetoran pajak (PPN/PPh) dari CV/PT/Instansi
954	Surat Tanda Setoran (STS)
955	Laporan Realisasi Daerah
955.1	Laporan Realisasi Penerimaan Daerah
955.2	Laporan Realisasi Pengeluaran Daerah
956	Rekonsiliasi
956.1	Surat Rekonsiliasi Penerimaan
956.2	Laporan Rekonsiliasi Bank
957	Laporan Mutasi Penetapan Deposito
958	Surat Perintah Transfer Uang (SPTU)
959	-
<b>960</b>	<b>EVALUASI DAN PENGENDALIAN</b>
961	Tuntutan Ganti Rugi
962	Tuntutan Perbendaharaan
963	Evaluasi dan Perubahan APBD Kabupaten / Kota
964	Evaluasi dan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten / Kota
965	Edaran-Edaran
966	-
967	-
968	-
969	-
<b>970</b>	<b>PENDAPATAN</b>
971	Perimbangan Keuangan

- 971.1 Bagi Hasil Pajak
  - 971.1.1 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
  - 971.1.2 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
  - 971.1.3 Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPH Pasal 21)
- 971.2 Bagi Hasil Bukan Pajak
  - 971.2.1 Pemberian Hak Atas Tanah Pemerintah
  - 971.2.2 Provisi Sumber Daya Hutan
  - 971.2.3 Sumber Daya Alam / Migas
  - 971.2.4 Iuran Eksplorasi / Landrent
- 972 Subsidi
- 973 Pajak
  - 973.1 Pajak Kendaraan Bermotor
  - 973.2 Pajak Kendaraan Di Atas Air
  - 973.3 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
  - 973.4 Bea Balik Nama Kendaraan Di Atas Air
  - 973.5 Pajak bahan kendaraan bermotor
  - 973.6 Pajak pengembalian dan pemanfaatan ABT
  - 973.7 Pajak pengembalian dan pemanfaatan AP
  - 973.8 Pajak Lainnya
- 974 Retribusi
  - 974.1 Retribusi pelayanan kesehatan
  - 974.2 Retribusi pemakaian kekayaan daerah
  - 974.3 Retribusi tempat pelelangan ikan
  - 974.4 Retribusi tempat penginapan / pesanggrahan / villa
  - 974.5 Retribusi penjualan produksi usaha daerah
  - 974.6 Retribusi Hasil Hutan
    - 974.6.1 Pengendalian kayu lintas Kabupaten / Kota
    - 974.6.2 Ijin Pemanfaatan Flora dan Fauna
    - 974.6.3 Tempat pelelangan hasil hutan
  - 974.7 Retribusi ijin pengambilan dan pemanfaatan ABT / AP
  - 974.8 Retribusi bidang metrologi
  - 974.9 Retribusi penyelenggaraan perhubungan
    - 974.9.1 Ijin Trayek
    - 974.9.2 Penyelenggaraan Telkom
    - 974.9.3 Dispensasi Kelebihan Muatan
    - 974.9.4 Retribusi Tempat Parkir
    - 974.9.5 Retribusi Lainnya
- 975 Bea
- 976 Cukai
- 977 Pungutan
- 978 Bantuan
  - 978.1 Bantuan Presiden
  - 978.2 Bantuan Menteri
  - 978.3 Bantuan Gubernur
  - 978.4 Bantuan Bupati
  - 978.5 Bantuan Lainnya
- 979 Pendapatan Lainnya
  - 979.1 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
    - 979.1.1 Pelepasan Hak Atas Tanah
    - 979.1.2 Penjualan Rumah Jabatan / Rumah Dinas
    - 979.1.3 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua
    - 979.1.4 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat
    - 979.1.5 Penjualan Bongkaran Bangunan dan Inventaris



979.1.6	Penjualan Drum Bekas
979.1.7	Penjualan Hasil Penebangan Pohon
979.2	Penerimaan Jasa Giro
979.2.1	Jasa Giro Kas Daerah
979.2.2	Jasa Giro Pemegang Kas
979.2.3	Jasa Giro Khusus
979.3	Penerimaan Bunga Bank
979.3.1	Bunga Deposito
979.3.2	Bunga Tabungan
979.4	Penerimaan Ganti Rugi atas Kerugian / Kehilangan Kekayaan Daerah (TP – TGR)
979.4.1	Sumbangan Pihak Ketiga
979.4.2	Sumbangan Pihak Ketiga Kendaraan (Dealer)
979.4.3	Sumbangan Pihak Ketiga Kayu
979.5	Penerimaan lain-lain
979.5.1	Penerimaan Kembali Kredit BKK
979.5.2	Ternak Tidak Layak Bibit
979.5.3	Sewa Internet
979.5.4	Penerimaan dari Dana Bergulir / Revolving
979.5.5	Kerjasama dengan BUMIDA
979.5.6	Penerimaan DUKS
979.5.7	Tempat Rekreasi
979.5.8	Setoran TP – TGR
979.5.9	Penerimaan Lainnya dari Setda / Dinas – Dinas

**980      PENGELUARAN**

981	-
982	-
983	-
984	-
985	-
986	-
987	-
988	-
989	-

**990      BENDAHARAWAN**

991	SKPP
992	Teguran SPJ
993	-
994	-
995	-
996	-
997	-
998	-
999	-

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KUDUS  
NOMOR 39 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN TATA KEARSIPAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KUDUS.

ANGKA KODE PERANGKAT DAERAH

I. Umum :

1. Untuk membedakan Perangkat Daerah dalam pengelolaan Jaringan Informasi Kearsipan maka disusun Angka Kode Perangkat Daerah.
2. Angka Kode Perangkat Daerah adalah tanda pengenal Perangkat Daerah yang dinyatakan dengan angka.

II. Angka Kode Perangkat Daerah Kabupaten Kudus :

00.00	Non Perangkat Daerah
01.00	Bupati
02.00	Wakil Bupati
03.00	Sekretariat Daerah
04.00	Asisten Pemerintahan
04.01	Bagian Tata Pemerintahan
04.02	Bagian Hukum
05.00	Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat
05.01	Bagian Perekonomian
05.02	Bagian Pengendalian Pembangunan
05.03	Bagian Kesejahteraan Rakyat
06.00	Asisten Administrasi
06.01	Bagian Organisasi
06.02	Bagian Perlengkapan dan Keuangan
06.03	Bagian Umum
07.00	Sekretariat DPRD
07.01	Bagian Umum dan Humas
07.02	Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan
07.03	Bagian Keuangan
08.00	Inspektorat Daerah
08.01	Sekretariat
08.02	Inspektur Pembantu Wilayah I
08.03	Inspektur Pembantu Wilayah II
08.04	Inspektur Pembantu Wilayah III
09.00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga
09.01	Sekretariat
09.02	Bidang Pendidikan Dasar
09.03	Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
09.04	Bidang Kepemudaan
09.05	Bidang Olah Raga
09.06	UPT Sekolah Menengah Pertama
09.06.01	SMP 1 Kaliwungu
09.06.02	SMP 2 Kaliwungu
09.06.03	SMP 1 Kudus
09.06.04	SMP 2 Kudus
09.06.05	SMP 3 Kudus

